

SKRIPSI
UPAYA KELOMPOK TANI MENGELOLA PUPUK BERSUBSIDI
DI DESA CARAWALI KECAMATAN WATANG PULU
KABUPATEN SIDRAP



OLEH :

NURHIKMA
NIM. 18.3400.005

PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPAPE

2023 M/1444 H

**UPAYA KELOMPOK TANI MENGELOLA PUPUK BERSUBSIDI
DI DESA CARAWALI KECAMATAN WATANG PULU
KABUPATEN SIDRAP**



OLEH :

**NURHIKMA
NIM. 18.3400.005**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) pada Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023 M/1444 H

**UPAYA KELOMPOK TANI MENGELOLA PUPUK BERSUBSIDI
DI DESA CARAWALI KECAMATAN WATANG PULU
KABUPATEN SIDRAP**

SKRIPSI

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarana Sosial (S.Sos)**

Program Studi

Pengembangan Masyarakat Islam

Disusun dan diajukan oleh

NURHIKMA

NIM: 18.3400.005

PAREPARE

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023 M/1444 H

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Upaya Kelompok Tani Mengelola Pupuk
Bersubsidi Desa Carawali Kecamatan Watang
Pulu Kabupaten Sidrap

Nama Mahasiswa : NURHIKMA

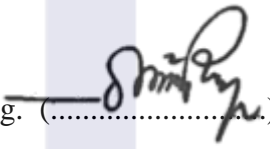
Nomor Induk Mahasiswa : 18.3400.005

Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam


Fakultas : Ushuluddin Adab Dan Dakwah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
B-2675 /In.39.7/12/2021

Disetujui oleh Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Jufri, M. Ag. (.....)

NIP : 197207232000031001

Dosen Pembimbing Pendamping : I Nyoman Budiono, M.M. (.....)

NIP : 2015066907

Mengetahui :
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah

Dr. A. Nurkaidam, M.Hum
NIP. 196412311992031045

SKRIPSI

**UPAYA KELOMPOK TANI MENGELOLA PUPUK BERSUBSIDI DI DESA
CARAWALI KECAMATAN WATANG PULU KABUPATEN SIDRAP**

Disusun dan diajukan oleh:

NURHIKMA

NIM: 18.3400.005

Telah dipertahankan di depan Sidang Ujian Munaqasyah

Pada tanggal 04 Januari 2023

Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Jufri, M. Ag. (.....)

NIP : 197207232000031001

Dosen Pembimbing Pendamping : I Nyoman Budiono, M.M. (.....)

NIP : 2015066907

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah


Dr. A. Nuzulidam, M.Hum
NIP. 196412311992031045

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Upaya Kelompok Tani Mengelola Pupuk
Bersubsidi Desa Carawali Kecamatan Watang
Pulu Kabupaten Sidrap

Nama Mahasiswa : NURHIKMA

Nomor Induk Mahasiswa : 18.3400.005

Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam

Fakultas : Ushuluddin Adab Dan Dakwah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
B-2675 /In.39.7/12/2021

Tanggal Kelulusan : 04 Januari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Muhammad Jufri, M.Ag. (Ketua) (.....)

I Nyoman Budiono, M.M. (Sekretaris) (.....)

Dr. Musyarif, S.Ag., M.Ag. (Anggota) (.....)

Muhammad Haramain, M.Sos.I (Anggota) (.....)

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah



Dr. A. Nurkidam, M.Hum

NIP. 196412311992031045

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
 وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Oleh karena itu, tiada kata yang terindah selain ucapan syukur tak terhingga karena penulis dapat menyelesaikan tulisan ini yang berjudul “Upaya Kelompok Tani Mengelola Pupuk Bersubsidi Di Desa Carawali Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap” tepat pada waktunya. Serta tidak lupa penulis kirimkan shalawat dan salam kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW, sebagai sumber semangat, panutan serta motivator dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Penulis banyak berterima kasih yang setulus-tulusnya kepada ayahanda Makkasau dan ibunda Mulyani dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dengan bantuan dari bapak Dr. Muhammad Jufri, M.Ag dan I Nyoman Budiono, M.M selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M,Ag. Selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAINParepare.
2. Bapak Dr. A. Nurkidam, M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah atas pengabdian beliau serta arahnya yang diberikan mampu menciptakan suasana pendidikan yang positif bagimahasiswa.
3. Bapak Afidatul Asmar, M.Sos. Selaku Ketua Prodi Studi Pengembangan Masyarakat Islam, yang telah meluangkan waktunya dan memberikan arahan dalam mendidik penulis selama ada di IAIN Parepare.
4. Bapak Dr Ramli, S.Ag. M.sos I, selaku Dosen Penasehat Akademik (PA), yang telah meluangkan waktunya dan memberikan arahan dalam mendidik penulis selama ada di IAIN Parepare.
5. Segenap Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang telah memberikan ilmunya kepadapenulis.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah melayani dan menyediakan referensi terkait dengan judul penelitianpenulis.
7. Kepala Desa Carawali Bapak ABD. HAFID MEKKA, A.M.P.,S.Ip serta para staf kantor Desa Carawali yang telah menerima penulis dengan baik untuk melaksanakan penelitian di Desa Carawali.
8. Masyarakat Desa Carawali yang dengan senang hati ingin menjadi

Narasumber penulis, terima kasih telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk diwawancarai.

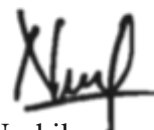
9. Para staf akademik, staf rektor, dan khususnya staf Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang telah membantu dan melayani penulis dengan baik.
10. Keluarga besar IAIN Parepare, khususnya teman-teman seperjuangan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam atas dukungan, semangat, serta kerjasamanya.
11. Kepada sahabat saya Nurhikmah dan serta teman-teman seperjuangan saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih telah memberikan saya masukan serta semangat dalam mengerjakan penyelesaian skripsi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran dan kritikan yang sifatnya membangun sehingga penulis dapat berkarya yang lebih baik pada masa yang akan datang. Aamiin

Sidrap, 02 Agustus 2022
5 Muharram 1444 H

Penulis,



Nurhikma
18.3400.005

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Nurhikma
NIM : 18.3400.005
Tempat/Tgl.Lahir : Carawali, 18 April 2000
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Judul Skripsi : Upaya Kelompok Tani Mengelola Pupuk Bersubsidi di Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Sidrap, 02 Agustus 2022
5 Muharram 1444 H

Penulis,



Nurhikma
18.3400.005

ABSTRAK

NURHIKMA. *Upaya Kelompok Tani Mengelola Pupuk Bersubsidi Desa Sidrap Kecamatan Watang pulu Kabupaten Sidrap*(dibimbing oleh Muhammad Jufri dan I Nyoman Budiono).

Upaya kelompok tani mengelola pupuk bersubsidi bertujuan untuk membantu petani agar bisa mengelola pupuk sesuai dengan kebutuhannya. Tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui upaya kelompok tani mengelola pupuk bersubsidi, yang kedua untuk mengetahui bentuk pengelolaan pupuk bersubsidi di Desa Carawali Kecamatan Watang pulu Kabupaten Sidrap.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya kelompok tani mengelola pupuk bersubsidi di Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap yaitu, Pertama adanya pertemuan pengurus kelompok tani yang terdiri dari ketua kelompok tani, sekretaris, bendahara dan kepala-kepala seksi. Kedua, musyawarah anggota kelompok tani dipimpin oleh ketua kelompok tani. Ketiga, pertemuan pengurus kelompok tani untuk membahas dan merumuskan RDKK. Keempat, meneliti kelengkapan RDKK dan penandatanganan RDKK. Sedangkan bentuk pengelolaan pupuk bersubsidi di Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap yaitu dengan melalui beberapa tahapan yang pertama, perencanaan yang dilakukan sebagai sarana awal dalam pencatatan jumlah dan takaran penyaluran pupuk hingga ketangan para petani. Kedua, penyaluran yang diawasi sesuai dengan permendag. Ketiga, pengawasan yang bertujuan untuk efektifitasan jumlah dan kebutuhan pupuk bersubsidi. Keempat, monitoring evaluasi penyediaan dan penyaluran melalui badan pengawasan. Kelima, verifikasi penyaluran yaitu bentuk pendampingan penyaluran hingga dapat digunakan oleh para petani sesuai dengan kebutuhannya.

Kata Kunci: Upaya, Kelompok Tani, Pengelolaan, Pupuk Bersubsidi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	vi
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	XIV
DAFTAR LAMPIRAN.....	XV
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	5
C. TUJUAN PENELITIAN.....	5
D. KEGUNAAN PENELITIAN	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. TINJAUAN PENELITIAN RELEVAN.....	7
B. TINJAUAN TEORI.....	10
1. Teori Diseminasi Informasi	10
2. Upaya	11
3. Kelompok Tani	13
4. Pengelolaan.....	16
5. Pupuk Bersubsidi	28
C. KERANGKA KONSEPTUAL.....	30
1. Upaya Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Produktivitas Pertanian	30
2. Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Bagi Petani	32
D. KERANGKA PIKIR	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN	37
B. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN	37
C. FOKUS PENELITIAN.....	38
D. JENIS DAN SUMBER DATA.....	38
E. TEKNIK PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA	40
1. Observasi	40
2. Wawancara	41

3. Dokumentasi.....	41
F. UJI KEABSAHAN DATA	42
1. Derajat Kepercayaan (Credibility).....	43
2. Kebergantungan (Depenbilty)	43
3. Kepastian (Comfirmability).....	43
4. Triangulasi.....	43
G. TEKNIK ANALISIS DATA.....	44
a. Reduksi Data.....	44
b. Penyajian Data.....	45
c. Verifikasi	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. UPAYA KELOMPOK TANI MENGELOLA PUPUK BERSUBSIDI.....	47
B. BENTUK PENGELOLAN PUPUK BERSUBSIDI	54
a. Perencanaan	54
b. Penyaluran	56
c. Pengawasan	58
d. Monitoring.....	59
e. Verifikasi dan Validasi Penyaluran	61
BAB V PENUTUP.....	65
A. KESIMPULAN.....	65
B. SARAN	66
DAFTAR PUSTAKA	I
PEDOMAN WAWANCARA.....	VI

DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	36



DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Nama nama kelompok tani	Lampiran
2	Pedoman wawancara	Lampiran
3	Izin melaksanakan penelitian dari IAIN parepare	Lampiran
4	Izin melaksanakan penelitian dari pemerintah kabupaten Sidrap	Lampiran
5	Surat keterangan telah melakukan penelitian	Lampiran
6	Keterangan wawancara	Lampiran
7	Dokumentasi	Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanian sering kali ditanggalkan dari kemoderenan, mungkin karena dianggap tradisional. Siapapun tidak meragukan bahwa dalam gelombang ekonomi pertama sektor pertanian benar-benar berada dalam posisi superioritas. Perhatian dan pemihakan sosio-ekonomi dan politik dari pemerintah, institusi terkait (terutama lembaga penelitian, pusat pengembangan teknologi pertanian) dan pelaku-pelaku pembangunan terhadap sektor pertanian bagai tidak bersekat, tumpah ruah dan total. Pemihakan semua komponen bangsa terhadap pertanian, terutama padi, di sadari sangat nyata.¹

Pembangunan pertanian selalu dikaitkan dengan kondisi daerah pedesaan, baik dari masyarakatnya ataupun keadaan alam daerah tersebut, didalam mengubah ataupun membina masyarakat tani diperlukan orang atau kelompok yang punya wawasan dan informasi teknologi yang senantiasa berubah. Sebagaimana dalam Firman Allah yang berbunyi :

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبَثَ لَآ يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ
نُصِرْفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ۝

Terjemahnya: Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur. (Q.S Al-A 'rāf [7] ayat 58)²

¹ Iwan Setiawan, *Agribisnis Kreatif*, Penebar Swadaya, (Jakarta, 2012), hlm, 115

² Monang, *Tafsir Al-Quran Kemenag Online*, (2014),

Dari terjemahan surah al-‘araf diatas terdapat kandungan isi yaitu Alam semesta khususnya bumi yang menjadi tempat tinggal manusia sudah barang tentu haru kita jaga dan kita lindungi bersama. Beberapa orang atau bahkan banyak orang yang tak peduli dengan lingkungan, orang-orang tersebut seenaknya saja merusak alam tanpa memperhatikan kesudahannya (akibatnya) setelah perbuatan yang mereka perbuat. Beberapa orang yang membuat kerusakan tersebut tak hanya membuat kerusakan kepada benda ataupun alam saja namun juga merusak sikap, melakukan berbagai macam perbuatan yang tercela, melakukan maksiat dan bahkan masih hidup seperti saat zaman jahiliah dulu. Allah SWT sebagai Tuhan seluruh Alam semesta melarang umat manusia untuk membuat kerusakan di muka bumi. Allah mengirimkan manusia sebagai khalifah yang seharusnya mampu memanfaatkan, mengelola dan memelihara bumi dengan baik bukan malah sebaliknya yang merusak bumi. Dalam surah di atas juga terdapat kandungan bahwa salah satu karunia Allah yang besar adalah menggerakkan Angin sebagai tanda akan datangnya rahmat-Nya. Angin membawa awan tebal dan di halau ke negeri yang kering disana terdapat tanaman yang telah mati karena kekeringan, sumur-sumur warga telah kering dan masyarakat tekeh kehausan. Allah akhirnya menurunkan hujan ke negeri tersebut dan negeri yang hampir mati tersebut akhirnya hidup subur kembali. Dengan itu juga telah di hidupkannya negeri tersebut dan dengan kemakmuran atas tanaman-tanaman yang melimpah banyak.

Kelompok tani adalah kumpulan petani yang terikat secara nonformal atas dasar keserasian, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) keakraban, kepentingan bersama dan saling percaya mempercayai, serta mempunyai pimpinan atau (ketua) untuk mencapai tujuan bersama. Atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan dan kondisi sumberdaya alam

dalam berusaha tani dalam pengertian tersebut diatas, kumpulan petani yang terikat secara nonformal tersebut berada pada suatu wilayah hamparan usaha tani (Dalam suatu wilayah kerja) keuntungan orang yang bekerja sama dalam suatu kelompok pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat. Pertemuan kelompok juga memberikan semangat individu dalam kelompok akibat mendapat informasi dalam setiap pertemuan kelompok.

Salah satu kebutuhan sumber dayatani yang perlu menjadi sorotan adalah pupuk. Pada dasarnya pupuk merupakan kebutuhan primer dalam pertanian karena pemakaiannya masih dapat diperhitungkan, tetapi karena iklim yang tidak menentu tersebut menjadikan pupuk sebagai kebutuhan yang harus diutamakan. Untuk ketersediaan pupuk perlu adanya kerjasama dengan perusahaan produsen pupuk guna memenuhi kebutuhan para petani.

Berdasarkan penyaluran dan pengadaanya pupuk terbagi dua, yaitu pupuk bersubsidi dan pupuk non subsidi. Pupuk bersubsidi merupakan pupuk yang pengadaanya dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Menperindag) Nomor 15/M-DAG/4/2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, sedangkan pupuk non subsidi merupakan pupuk yang pengadaan dan penyalurannya di luar program pemerintah dan tidak mendapat subsidi.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan tersebut, Pasal 1 angka 1 Yang dimaksud dengan Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian meliputi Pupuk

Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis Pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.³

Dengan demikian pemerintah menyediakan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Esensi dari kebijakan pupuk bersubsidi sejak tahun 1969 yaitu mendorong peningkatan produktivitas dan produksi pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan petani. Adapun sejak saat itu subsidi pupuk diberikan dalam bentuk harga eceran tertinggi (HET). Subsidi pupuk diberikan dalam bentuk penyediaan dana yang menutupi selisih antara harga pokok produksi pupuk dengan HET untuk petani yang telah ditetapkan oleh pemerintah.⁴

Desa Carawali merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Watang pulu Kabupaten Sidrap yang masih terus memiliki masalah pendistribusian pupuk bersubsidi yaitu seringnya terjadi isu langka pasok dan lonjak harga pupuk ditingkat petani, petani yang membutuhkan pupuk bersubsidi datang sendiri ke kios pengecer. Pada kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa tidak semua petani mampu membeli pupuk secara tunai atau bahkan tidak mampu membeli pupuk secara memadai dan petani yang termasuk kategori ini umumnya melakukan sistem pembelian pupuk tunda bayar (hutang), dimana pembayarannya dilakukan setelah panen (pasca panen).

Petani harus menyiapkan dana lebih besar, jika petani tidak memiliki dana lebih besar, maka petani tidak mampu untuk membeli pupuk non-subsidi,

³ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 15/m-dag/per/4/2013, *Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian*, (Jakarta, 2013)

⁴ Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 11 NO. 1, (Juni 2014) : 45-60

dan hanya mampu membeli pupuk dengan volume yang lebih sedikit, hal ini nantinya akan berimbas pada proporsi kebutuhan pupuk pada tanaman, ketika tanaman tidak mendapatkan proporsi pupuk yang baik, maka otomatis penurunan kualitas dan juga kuantitas akan terjadi.

Berdasarkan latar belakang diatas, menjadi dasar pertimbangan penulis untuk mengetahui bagaimana upaya kelompok tani mengelola pupuk bersubsidi di Desa carawali kecamatan watang pulu kabupaten sidrap. Dengan demikian maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Upaya Kelompok Tani Mengelola Pupuk Bersubsidi di Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengambil rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana upaya kelompok tani mengelola pupuk bersubsidi di Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap?
2. Bagaimana bentuk pengelolaan pupuk bersubsidi Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya kelompok tani mengelola pupuk bersubsidi di Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap.
2. Untuk mengetahui bentuk pengelolaan pupuk bersubsidi Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi landasan dalam mengetahui sistem penyaluran pupuk bersubsidi yang sesuai dengan etika bisnis islam.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan (referensi) bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian pada saat yang akan datang dan juga dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang juga meneliti tentang hal terkait dengan judul penelitian ini

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi peneliti: Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti tentang proses penyaluran pupuk bersubsidi yang berdasarkan dengan prinsip etika bisnis islam dan juga sarana penerapan dari ilmu pengetahuan yang selama ini diperoleh dari bangku kuliah
- b. Bagi masyarakat: penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi masyarakat, khususnya para masyarakat petani di Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap tentang sistem penyaluran pupuk bersubsidi yang berdasarkan dengan etika bisnis islam
- c. Bagi Pemerintah: Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada pemerintah agar proses penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan berdasarkan etika bisnis islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pada bagian tinjauan penelitian relevan, penelitian penulis terdiri dari beberapa referensi. Referensi tersebut dijadikan sebagai bahan acuan yang berkaitan dengan judul skripsi yang ingin diteliti oleh penulis tentang “Upaya Kelompok Tani Mengelola Pupuk Bersubsidi Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap”. Adapun sumber rujukan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan skripsi yang akan diteliti sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Khairunisyah pada tahun 2009 dengan judul “Efektivitas Penyaluran Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Padi Di Kabupaten Lampung Tengah. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Lampung Bandar Lampung”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Penelitian ini penulis menjelaskan berdasarkan analisis data yang diperoleh dari pembahasan mengenai penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah maka dapat disimpulkan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ini ditinjau dari segi ketepatan harga, ketepatan jumlah, ketepatan jenis, dan ketepatan waktu telah terlaksana dengan sangat efektif dan pelaksanaan telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan pupuk bersubsidi tahun 2009 dan berdasarkan pengukuran variabel pelaksanaan penyaluran ini secara keseluruhan dengan tingkat persentase sebesar 95,68%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi ini sangat efektif, dan Peran pemerintah dalam rangka meringankan beban petani melalui pupuk bersubsidi telah tercapai.

Pengeluaran negara ini secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap sektor distribusi barang dan jasa. Subsidi yang diberikan untuk masyarakat menyebabkan masyarakat yang kurang mampu dapat menikmati barang atau jasa yang dibutuhkan. Pupuk bersubsidi membantu peningkatan pendapatan petani, sehingga kehidupan petani dapat lebih sejahtera. Selain itu dengan adanya subsidi pupuk sangat membantu petani di daerah yang dapat meningkatkan produksi komoditas pertanian sehingga dapat mendukung ketahanan pangan nasional.⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Citra Hasibun pada tahun 2012 dengan judul “Peranan Kelompok Tani Terhadap Keberhasilan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa Serba Jadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian skoring dan deskriptif. Hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana anggota kelompok tani mengetahui UU penyaluran pupuk bersubsidi yaitu ; 33,3% yang mengetahui, 20% ragu-ragu dan 46,7% yang tidak mengetahui. Berdasarkan pengetahuan kelompok tani tentang harga subsidi dalam Desa Serba Jadi diketahui 30% yang mengetahui, 23% ragu-ragu dan 47% yang tidak mengetahui. Berdasarkan pengetahuan kelompok tani tentang pihak-pihak yang terlibat dalam penyaluran pupuk bersubsidi 13 % yang mengetahui,ragu-ragu 10% dan 77% yang tidak mengetahui. Berdasarkan pengetahuan kelompok tani tentang saluran distribusi dalam penyaluran pupuk bersubsidi 10% yang mengetahui, 6,7% ragu-ragu dan 83,3% yang tidak mengetahui. Berdasarkan pengetahuan kelompok tani tentang tempat dan cara dalam penyaluran pupuk bersubsidi 50% yang mengetahui,

⁵Khairunisya, “Efektifitas Penyaluran Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Padi Di Kabupaten Lampung Tengah”. (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi Universitas Lampung Bandar Lampung, 2009)

33,3% ragu-ragu dan 16,7 yang tidak mengetahui. Peranan kelompok tani terhadap keberhasilan pupuk bersubsidi dapat dikatakan cukup. Masalah penyaluran pupuk bersubsidi di daerah penelitian tidak berjalan dengan baik hal ini ditunjukkan dengan tidak sesuainya konsep RDKK berdasarkan azas 6 tepat (jenis, harga, jumlah, tempat, tepat dan waktu).⁶

Penelitian ini dilakukan oleh Agus Dwi Nugruho pada tahun 2018 dengan judul “Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ketersediaan dan kebutuhan pupuk di kabupaten bantul bersifat fluktuatif dengan kecenderungan ada beberapa bulan yang mengalami kelangkaan stok pupuk. Distribusi pupuk di kabupaten bantul secara keseluruhan cukup efektif dan efisien namun terkadang masih terjadi belum tepat jumlah dan tepat harga serta alurnya tidak sesuai dengan ketentuan resmi yang ditetapkan pemerintah. Masalah dalam distribusi pupuk di Kabupaten Bantul antara lain database ketersediaan dan kebutuhan pupuk tidak lengkap, pengecer menjual pupuk kepada selain kelompok tani sedangkan petani membeli pupuk tidak melalui kelompok tani, petani keberatan dengan fee kepada kelompok tani sehingga petani membeli pupuk tidak melalui kelompok tani, petani keberatan dengan fee kepada kelompok tani sehingga petani membeli pupuk langsung kepada pengecer ataupun membeli pupuk kepada kelompok tani namun di atas Harga Eceran Tertinggi, lokasi pengecer yang terlalu jauh dari lokasi petani, harga pupuk di

⁶Dewi Citra Hasibun. “Peranan Kelompok Tani Terhadap Keberhasilan Penyaluran Pupuk Bersubsidi”. (Skripsi Sarjana; Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara Medan, 2012).

atas HET karena adanya tambahan biaya transportasi dan masih banyak penyelewengan distribusi pupuk.⁷

B. Tinjauan Teori

1. Teori Diseminasi Informasi

Diseminasi informasi adalah proses penyebaran informasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola. Hal ini berbeda dengan difusi yang merupakan alur komunikasi spontan. Sehingga terjadi saling tukar informasi dan akhirnya terjadi kesamaan pendapat mengenai suatu inovasi.

Dengan kata lain, diseminasi merupakan kegiatan penyebaran informasi ke dalam lingkungan masyarakat. Kejadiannya dapat dilakukan melalui pelatihan atau workshop, seminar, dan komunikasi. Selain melalui berbagai kegiatan pelatihan, diseminasi informasi dapat diselenggarakan dalam bentuk konferensi pers, wawancara pers, penulisan artikel, publikasi atau melalui penerbitan.

Diseminasi melalui konferensi pers, merupakan kegiatan yang dilakukan dengan mengundang wartawan dari sejumlah media cetak, TV, radio dan media online ke suatu tempat yang ditentukan dan menghadirkan satu atau beberapa narasumber untuk memberikan keterangan atau pernyataan sehubungan dengan isu yang akan disampaikan. Diseminasi melalui wawancara pers, merupakan kegiatan yang dilakukan dengan mengundang wartawan dari salah satu media cetak atau elektronik, atau media online ke suatu tempat dimana satu orang narasumber dihadirkan untuk diwawancarai. Hasil wawancara tersebut kemudian dimuat sebagai berita dalam media.

⁷Agus Dwi Nugroho “Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”,(Skripsi Sarjana; Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2018)

Diseminasi melalui penulisan artikel, yaitu membuat tulisan mengenai suatu topik untuk dimuat dalam sebuah jurnal ilmiah atau buletin yang diterbitkan sendiri atau instansi, lembaga, organisasi lain, atau dikirim ke redaksi suatu penerbitan media cetak. Diseminasi melalui publikasi adalah membuat barang cetakan seperti poster, flier, brosur, leaflet, dan lain-lain. Kemudian disebarakan kepada publik atau ditempatkan pada papan informasi yang tersedia di suatu instansi.

Diseminasi melalui dialog atau talkshow, yaitu kegiatan penayangan acara perbincangan dan tanya jawab dengan suatu topik melalui televisi atau radio dengan menampilkan beberapa orang ahli sebagai narasumber. Dengan adanya diseminasi, informasi dapat menyebar dengan cepat dan meluas di kalangan publik, baik secara internal maupun eksternal.⁸

2. Upaya

a. Pengertian Upaya

Dalam kamus Etismologi kata upaya memiliki arti yaitu yang didekati atau pendekatan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan dibuku lain menjelaskan bahwa pengertian upaya yaitu suatu usaha, akal atau akhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar.

Sebagaimana islam menjelaskan dalam surah An najm ayat 39-42:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى . وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى . ثُمَّ يُجْزَاهُ
الْجِزَاءَ الْأَوْفَى . وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى

⁸<http://www.manadokota.go.id/berita-1194-apakah--diseminasi--informasi--itu.html>, (13 Juli 2022)

Terjemahnya:

Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya). Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan bahwasanya kepada Tuhan mulah kesudahan (segala sesuatu), (*QS. An Najm: 39-42*)

b. Upaya Kelompok Tani

Peran kelompok tani memberdayakan anggotanya, tidak semata-mata untuk meningkatkan kemampuan diri anggota, namun lebih dari itu untuk mendorong anggota bersedia mengikuti perkembangan yang terjadi. Sebagai ilustrasi misalnya perkembangan cara berusaha tani mengenai pemahaman tentang penggunaan pupuk organik sebagai pengganti bahan-bahan kimia atau pupuk non organik, atau penggunaan traktor sebagai pengganti cangkul. Ini merupakan bentuk nyata penerapan upaya dalam memberikan pemahaman yang positif kepada anggota kelompok tani.

Adapun upaya kelompok tani dalam memberdayakan anggotanya ialah:

- 1) Mendorong anggota kelompok tani untuk terus belajar, sambil bekerja. Belajar, tidak harus dilakukan di bangku persekolahan dan menggunakan pendidikan yang berjenjang, juga dapat dilakukan melalui pendidikan luar sekolah atau pendidikan masyarakat.
- 2) Melayani dan mengembangkan sistem informasi melalui jejaring kerja yang lebih luas. Konsekuensi dari perkembangan teknologi adalah beragamnya informasi baru kepada anggota kelompok tani yang tidak terbatas.
- 3) Mendorong kemandirian anggota kelompok tani. Kelompok tani memberikan kepercayaan kepada anggotanya untuk memimpin kelompok

secara bergiliran, memimpin kelompok diperlukan untuk kelangsungan kegiatan secara progresif.

- 4) Mendorong tumbuhnya keswadayaan kelompok. Dalam hal ini menempatkan bimbingan dan dukungan diarahkan agar kelompok tani mampu menumbuhkan kemampuan dan mengembangkan kegiatannya.

3. Kelompok Tani

a. Pengertian Kelompok Tani

Kelompok adalah kumpulan manusia yang merupakan kesatuan beridentitas dengan adat istiadat dalam sistem norma yang mengatur pola pola, dan mengatur interaksi antara manusia. Peraturan menteri pertanian, nomor: 273/Kpts/OT.160/4/2007, tanggal 13 April, tentang pembinaan kelembagaan petani bahwasanya kelompok tani mempunyai pengertian sebagai kumpulan petani, peternak, perkebunan yang dibentuk atas dasar kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Fungsi utama kelompok tani pada dasarnya adalah sebagai wahana dalam proses belajar mengajar, wahana kerjasama, dan wahana berproduksi⁹. Tani adalah mata pencaharian dalam bentuk bercocok tanam. Dengan demikian kelompok tani adalah kumpulan manusia yang memiliki kegiatan dalam bentuk bercocok tanam yang hidup bersama merupakan kesatuan beridentitas dan interaksi sesama sistem norma yang berlaku di dalamnya.

b. Ciri- Ciri Kelompok Tani

Kelompok tani memiliki ciri-ciri saling mengenal, akrab dan saling percaya antara sesama anggota, mempunyai pandangan dan kepentingan yang sama dalam

⁹Pamertan, *Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan* (Jakarta: Departemen Pertanian RI, 2015), h . 3.

berusaha tani serta memiliki kesamaan dalam tradisi atau pemukiman, hampan usaha, jenis usaha, status ekonomi atau sosial, bahasa, pendidikan dan juga terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama.

c. Tujuan Kelompok Tani

Tujuan dibentuknya kelompok tani adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan petani dan keluarganya sebagai subjek pendekatan kelompok, agar lebih berperan dalam pembangunan. Aktifitas usaha tani yang lebih baik dapat dilihat dari adanya peningkatan dalam produktivitas usahatani yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan petani sehingga akan mendukung terciptanya kesejahteraan yang lebih baik bagi petani dan keluarganya, tetapi masih banyak masyarakat yang berasumsi bahwa kelompok tani tidak mempunyai peran dalam peningkatan pendapatan bagi petani. Pembinaan kelompok tani perlu dilaksanakan secara lebih intensif, terarah dan terencana sehingga mampu meningkatkan peran dan fungsinya.¹⁰

d. Fungsi Kelompok Tani

Adapun fungsi kelompok tani sebagai kelompok belajar, yaitu wadah mengajar bagi anggotanya guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap serta tumbuh dan berkembangnya kemandirian dalam berusaha tani sehingga produktivitasnya meningkat, pendapatannya bertambah serta kehidupan menjadi lebih sejahtera. Kelompok tani sebagai wahana kerja sama untuk memperkuat kerja sama diantara sesama petani didalam kelompok tani serta dengan kelompok lain, sehingga

¹⁰Mohamad Ikbal, "Peranan Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi Sawah Di Desa Margamulya Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali". *Jurnal Agrotekbis*, Vol. 2 No. 5 (Oktober 2014), h. 506.

usaha taninya akan lebih efisien serta lebih mampu menghadapi tantangan, hambatan, dan gangguan. Kelompok tani sebagai unit produksi usaha tani yang dilaksanakan secara keseluruhan harus dipandang sebagai satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.¹¹

e. Unsur Pengikat Kelompok Tani

Adanya kepentingan dan tujuan bersama, penumbuhan kelompok tani dapat dilihat dari kelompok-kelompok atau organisasi yang sudah ada, petani dalam suatu wilayah, dapat berupa satu dusun atau lebih, satu desa atau lebih, dan juga berdasarkan domisili atau hamparan, yang memiliki anggota kelompok tani sekitar 20 sampai 25 petani atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat dan usaha taninya, selanjutnya kegiatan kelompok tani yang dikelola tergantung pada kesepakatan anggota, kegiatan-kegiatan dimaksud antara lain: jenis usaha, unsur-unsur subsistem agribisnis (pengadaan sarana produksi, pemasaran, pengelolaan hasil pasca panen).

Kelompok tani sebagai wadah kelompok dan bekerja sama antara anggota mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat tani, sebab segala kegiatan dan permasalahan dalam berusaha tani dilaksanakan oleh kelompok secara bersamaan. Melihat potensi tersebut, maka kelompok tani perlu dibina dan diberdayakan lebih lanjut agar dapat berkembang secara optimal.

Kelompok tani sebagai wadah kelompok dan bekerja sama antara anggota mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat tani, sebab

¹¹RinaldiPrasetia, TubagusHasanuddin, BegemViantimala, "Peranan Kelompok Tani Dalam Peningkatan Pendapatan Petani Kopi Di Kelurahan Tugusari Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat" *Jurnal Agrobisnis*, Vol. 3 No. 3, h. 302(Juni 2015).

segala kegiatan dan permasalahan dalam berusaha tani dilaksanakan oleh kelompok secara bersamaan. Melihat potensi tersebut, maka kelompok tani perlu dibina dan diberdayakan lebih lanjut agar dapat berkembang secara optimal.

4. Pengelolaan

a. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola yang mendapat awalan “peng” dan akhiran “an” sehingga menjadi pengelolaan yang berarti pengurus, perawatan, pengawasan, pengaturan. Pengelolaan itu sendiri awal katanya “kelola”, di tambah awalan “pe” dan akhiran “an” istilah lain dari pengelolaan adalah “manajemen”. Manajemen adalah kata yang aslinya dari bahasa Inggris yaitu “*management*”, yang berarti keterlaksanaan, tata pimpinan, pengelolaan manajemen atau pengelolaan dalam pengertian umum adalah pengadministrasian, pengaturan, atau penataan suatu kegiatan. Namun kata *management* sendiri sudah diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi kata manajemen yang berarti sama dengan “pengelolaan”, yakni sebagai suatu proses mengoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan kerja agar dapat diselesaikan secara efisien dan efektif.¹²

Kemudian, manajemen diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi pengelolaan. Pengelolaan dilakukan melalui proses dan dikelola berdasarkan urutan dan fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. Manajemen adalah melakukan pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah atau organisasi yang diantaranya adalah manusia, uang, metode, material, mesin dan pemasaran yang dilakukan dengan sistematis dalam suatu proses.¹³ Manajemen juga diartikan sebagai proses

¹² Rita Mraiya, *Pengelolaan Lingkungan Belajar*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.16

¹³ Rohiat, *Manajemen Sekolah, Teori Dasar dan Praktik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), h. 29

perencanaan, pengorganisasian, pimpinan dan pengendalian anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.¹⁴

b. Prinsip-prinsip Pengelolaan

Dalam proses pengelolaan tenaga pendidik erat kaitannya dengan prinsip prinsip manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai berikut:¹⁵

- 1) Prinsip kemanusiaan
- 2) Prinsip demokrasi
- 3) Prinsip *the right man is the right place*
- 4) Prinsip *equal pay for equal work*
- 5) Prinsip kesatuan arah
- 6) Prinsip kesatuan komando
- 7) Prinsip efisiensi
- 8) Prinsip efektivitas
- 9) Prinsip produktivitas kerja
- 10) Prinsip disiplin
- 11) Prinsip wewenang dan tanggung jawab.

c. Fungsi dan tujuan pengelolaan

Selain prinsip pengelolaan di atas adapun fungsi dan tujuan dari pengelolaan tenaga pendidik memiliki kesamaan baik fungsi maupun tujuan dengan sumber daya manusia. Sumber daya manusia tersebut diantaranya:¹⁶

- a) Tujuan organisasional, yaitu untuk mengenali keberadaan manajemen sumber daya manusia dalam pencapaian efektifitas kerja.

¹⁴ George R Terry, Prinsip-Prinsip Manajemen, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 15

¹⁵ Veithzal, Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 16- 18 1

¹⁶ Herman, Sofiyandi, Manjemen Sumber Daya Manusia Edisi Pertama, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 11-13

- b) Tujuan fungsional, yaitu untuk mempertahankan kontribusi departemen pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- c) Tujuan sosial, ditujukan secara etis dan merespon terhadap kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat melalui tindakan meminimalisir dampak negatif terhadap organisasi.
- d) Tujuan personal, yaitu untuk membantu karyawan dalam pencapaian tujuannya, minimal tujuan-tujuan yang dapat mempertinggi kontribusi individual terhadap organisasi.

Adapun fungsi-fungsi dari pengelolaan sebagai berikut:

1) Fungsi operasional terdiri dari:

- a) Pengadaan (*Procurement*) Usaha untuk memperoleh sejumlah tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan, terutama yang berhubungan dengan penentuan kebutuhan tenaga kerja, penarikan, seleksi, orientasi dan penempatan.
- b) Pengembangan (*Development*) Usaha untuk meningkatkan keahlian karyawan melalui program pendidikan dan latihan yang tepat agar karyawan atau pegawai dapat melakukan tugasnya dengan baik. Aktivitas ini penting dan akan terus berkembang karena adanya perubahan teknologi, penyesuaian dan meningkatnya kesulitan tugas manajer.
- c) Kompensasi (*Compensation*) Fungsi kompensasi diartikan sebagai usaha untuk memberikan balas jasa atau imbalan yang memadai kepada pegawai sesuai dengan kontribusi yang telah disumbangkan kepada perusahaan atau organisasi.

2) Fungsi manajerial terdiri dari :

- a) Perencanaan (*Planning*) Perencanaan mempunyai arti penentuan mengenai program tenaga kerja yang akan mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
- b) Pengorganisasian (*Organizing*) Organisasi dibentuk untuk merancang struktur hubungan yang mengaitkan antara pekerjaan, karyawan, dan faktor-faktor fisik sehingga dapat terjalin kerjasama satu dengan yang lainnya.
- c) Pengarahan (*Directing*) Pengarahan terdiri dari fungsi staffing adalah penempatan orang-orang dalam struktur organisasi, sedangkan fungsi leading dilakukan pengarahannya SDM agar karyawan bekerja sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. 18
- d) Pengawasan (*Controlling*) Adanya fungsi manajerial yang mengatur aktivitas-aktivitas agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh organisasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, bila terjadi penyimpangan dapat diketahui dan segera dilakukan perbaikan.

d. Tata Kelola Pupuk Bersubsidi Tahun 2022

Menteri Pertanian akan melakukan beberapa penyesuaian dan langkah perbaikan mengenai tata kelola dan regulasi pupuk bersubsidi.¹⁷ Sebab diakuinya, memang program itu mengalami masalah baik dari ketersediaan pupuk subsidi hingga penyelewengan terkait harga.

Langkah perbaikan yang akan dilakukan:

¹⁷Syahrul Yasin Limpo, Kutipan Pidato, (Diakses pada www.beritawarta.com)

- 1) Pertama, pihaknya bersama Pupuk Indonesia dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan membuat sistem aplikasi e-RDKK, seperti aplikasi PeduliLindungi. Jadi, aplikasi bisa mengontrol alur distribusi pupuk bersubsidi untuk menghindari penyelewengan.
- 2) Kedua, ada beberapa perubahan distribusi pupuk subsidi, antara lain dari 70 jenis komoditi yang ada, tinggal sembilan komoditi yang diberikan pupuk bersubsidi. Selain itu unsur pupuk yang disubsidi hanya dua yakni Urea dan NPK saja.
- 3) Ketiga, untuk menutup kekurangan akan kebutuhan pupuk ditingkat petani, Syahrul mengatakan akan mendorong pengembangan dan pengenalan pupuk organik yang dibuat sendiri oleh masyarakat melalui Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO).

Segala perbaikan itu merupakan hasil evaluasi dan rekomendasi yang telah dilakukan oleh Panja Pupuk Subsidi Komisi IV DPR RI dan Ombudsman RI terkait regulasi dan tata kelola program pupuk subsidi.

Adapun kebijakan pupuk bersubsidi Tahun 2022 yaitu sebagai berikut :

- 1) Perencanaan

Di tahap perencanaan, sebagian petani berada di posisi yang pasif. Mereka hanya menyetor KTP dan memercayakan proses selanjutnya ke pengurus kelompok tani dan penyuluh pertanian lapangan (PPL). Di sejumlah daerah, petani tidak tahu jatah pupuk yang diterimanya.

Manipulasi data RDKK terjadi hampir semua wilayah sebagaimana temuan Ombudsman RI (ORI) pada Desember 2021 ada 369.688 warga yang meninggal yang masuk data awal e-RDKK tahun 2021. Petani yang tercantum

dalam RDKK sekalipun tidak mendapatkan pupuk bersubsidi. Padahal, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 menyebutkan, pupuk bersubsidi hanya untuk petani terdaftar di RDKK.

Perencanaan memegang peran penting dalam menentukan keberhasilan program pupuk bersubsidi. Data yang tidak akurat berdampak pada alokasi pupuk yang tidak tepat sasaran.

2) Penyaluran

Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Dalam menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, menteri menugaskan PT. Pupuk Indonesia untuk melaksanakan hal tersebut bagi kelompok tani dan/atau petani berdasarkan perjanjian kementerian pertanian dengan PT. Pupuk Indonesia (Persero). PT. Pupuk Indonesia (Persero) menetapkan produsen sebagai pelaksana pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang bertanggung jawab pada wilayah provinsi/kabupaten dan kota tertentu. Produsen menunjuk distributor sebagai pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi dengan wilayah tanggung jawab di tingkat kabupaten/kecamatan/kota/desa tertentu.

Berikut adalah persyaratan penunjukan distributor sesuai Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/MDAG/PER/4/2013:¹⁸

- a) Bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum.
- b) Memiliki kantor dan pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha perdagangan di tempat kedudukannya.

¹⁸Permendagri Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

- c) Memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan kegiatan perdagangan yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Pergudangan.
- d) Memiliki dan/atau menguasai sarana gudang dan alat transportasi yang dapat menjamin kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya.
- e) Mempunyai jaringan distribusi yang dibuktikan dengan memiliki paling sedikit 2 (dua) pengecer di setiap Kecamatan dan/ atau Desa di Wilayah tanggung jawabnya.
- f) Rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perdagangan untuk penunjukkan Distributor baru.
- g) Memiliki permodalan yang cukup sesuai ketentuan yang dipersyaratkan oleh Produsen.

Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi diawasi oleh tim pengawas, yakni tim pengawas pupuk bersubsidi pada tingkat pusat, yang anggotanya terdiri dari instansi terkait di pusat yang ditetapkan oleh menteri penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertanian. Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan Pasal (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 meliputi jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam pasal (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 dilakukan sebagai berikut:

- a) PT. Pupuk Indonesia (Persero) melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di dalam Negeri

mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat;

- b) Produsen melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat diwilayah tanggung jawabnya.
- c) Komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida di tingkat provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur, melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV wilayah kerjanya serta melaporkan hasil pemantauan dan pengawasannya setiap bulan kepada gubernur dengan tembusan kepada produsen penanggung jawab wilayah.
- d) Komisi pengawasan pupuk dan pestisida ditingkat wilayah kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penyaluran dan penggunaan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya sertamelaporkannya kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada produsen penanggung jawab wilayah, direktur jenderal perdagangan dalam negeri dan direktur jenderal standarisasi dan perlindungan konsumen.
- e) Mekanisme pelaksanaan tugas pemantauan dan pengawasan dari komisi pengawas pupuk dan pestisida provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana ditetapkan pada ayat (2) huruf c dan d diatur lebih lanjut oleh Gubernur dan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan pedoman teknis pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

- f) Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi tingkat pusat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran bersubsidi mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV serta melaporkannya kepada menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- g) Direktur Jenderal Perdagangan dalam Negeri dan Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pengawasan langsung atas pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.
- h) Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Perdagangan melakukan pengawasan pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan ketersediaan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya dan dilaporkan kepada Gubernur dan komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen.
- i) Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Perdagangan melakukan pengawasan pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan ketersediaan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya dan dilaporkan kepada Bupati/Walikota dan komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perdagangan.

3) Pengawasan

Pengawasan pupuk bersubsidi dilakukan oleh seluruh instansi terkait yang tergabung dalam tim pengawasan pupuk bersubsidi tingkat pusat maupun oleh Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Komitmen dan peran aktif pemerintah daerah melalui optimalisasi kinerja tim pengawas dan KPPP baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam pengawalan dan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi sangatlah diharapkan untuk menjamin penyaluran pupuk bersubsidi agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.¹⁹

4) Monitoring

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan oleh Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat, Komisi Pengawas Pupuk dan Pesticida (KPPP) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pelaksana Subsidi Pupuk dan pihak/instansi terkait. KPPP di kabupaten/kota menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati/Walikota setiap bulan. Bupati/ Walikota dan KPPP Provinsi menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi setiap bulan kepada Gubernur.

Perkembangan pelaksanaan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi serta berbagai permasalahan dan upaya antisipasinya di masing-masing provinsi diharapkan dapat dilaporkan oleh Gubernur kepada Menteri Pertanian c.q. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian setiap bulan.

Satuan Kerja Propinsi atau Kabupaten/Kota yang memperoleh alokasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020, diwajibkan membuat laporan realisasi anggaran dan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya.

¹⁹Edi Setiadi dan Rena Yulia. Hukum Pidana Ekonomi (Yogyakarta; Graha ilmu 2010)

5) Verifikasi dan Validasi Penyaluran

a) Penetapan Tim Verifikasi dan Validasi

Penetapan Tim Verifikasi dan Validasi Kegiatan Pendampingan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan kapasitas SDM dan fungsi tugas sehari-hari. Jumlah anggota Tim verifikasi tingkat Kecamatan minimal 2 (dua) orang.
- 2) Tim Pembina Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota. Jumlah anggota Tim Pembina Kabupaten/Kota minimal 3 (tiga) orang.
- 3) Tim Pembina Provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi. Jumlah Tim Pembina Provinsi minimal 3 (tiga) orang.
- 4) Apabila jumlah Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dan Tim Pembina Provinsi/Kabupaten/ Kota dinilai kurang memadai maka jumlah tim dapat ditambah dengan menggunakan dana APBD I dan/atau APBD II.
- 5) Tim Verifikasi dan Validasi Pusat ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Subsidi Pupuk Tahun Anggaran 2021.

b) Hak dan Kewajiban Tim Verifikasi dan Validasi

Dalam pelaksanaannya tim verifikasi dan validasi mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

1) Hak

Tim Verifikasi dan Validasi

- (a) Tim verifikasi dan validasi berhak mendapatkan data dan informasi dari pengecer, distributor dan produsen pupuk bersubsidi terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan wilayah tugasnya.
- (b) Tim verifikasi dan validasi berhak mendapatkan honor dan biaya perjalanan terkait dengan pelaksanaan verifikasi dan validasi.

Tim Pembina

- (a) Tim Pembina berhak mendapatkan informasi dari pengecer, distributor dan produsen pupuk bersubsidi serta Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan wilayah tugasnya.
- (b) Tim Pembina berhak mendapatkan honor dan biaya perjalanan terkait dengan pelaksanaan pembinaannya.

2) Kewajiban

Tim Verifikasi dan Validasi

- a) Tim Verifikasi dan Validasi melaksanakan tugasnya pada waktu/jadwal yang sudah ditetapkan;
- b) Tim Verifikasi dan Validasi memastikan kebenaran data penyaluran pupuk.

Tim Pembina

- a) Melaksanakan tugas pembinaan berupa sosialisasi dan monitoring dan pembinaan pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi secara berjenjang;
- b) Membuat laporan hasil pembinaan.

e. Pupuk Bersubsidi

1) Pengertian pupuk bersubsidi

Dalam mengolah lahan pertanian agar dapat memberikan hasil yang berkualitas dan maksimal, petani menggunakan pupuk. Pupuk adalah suatu bahan yang digunakan untuk mengubah sifat fisik, kimia, atau biologi tanah sehingga menjadi lebih baik bagi pertumbuhan tanaman. Dalam pengertian yang khusus, pupuk adalah suatu bahan yang mengandung satu atau lebih hara tanaman.²⁰ Aktifitas pertanian yang secara terus menerus dilakukan mengakibatkan tanah kehilangan unsur hara. Oleh sebab itu untuk mengembalikan ketersediaan hara pada media tanam diperlukan pemberian pupuk.

Di Indonesia juga dikenal istilah subsidi, yang dalam hal ini terdapat pula pemberlakuan pupuk bersubsidi bagi petani. Kata subsidi dalam KBBI diartikan sebagai bantuan uang dan sebagainya kepada yayasan, perkumpulan, dan sebagainya (biasanya dari pihak pemerintah).

Pengertian pupuk bersubsidi dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/MDAG/PER/4/2013, yang menyatakan bahwa pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani di sektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK, dan jenis Pupuk bersubsidi lainnya yang diterapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.²¹

²⁰Unikom, “*Tinjauan Pustaka: Pengertian Pupuk*”, dalam lib.unikom.ac.id/download.php?id=225314, (diakses pada tanggal 19 April 2022).

²¹Permendagri Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Adapun induk dari perusahaan pupuk adalah PT. Pupuk Indonesia. PT Pupuk Indonesia (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang industri pupuk, petrokimia dan agrokimia, steam(uap panas) dan listrik, pengangkutan dan distribusi, perdagangan serta EPC (*Engineering, Procurement and Construction*). Pada tanggal 3 April 2012, sebagai *investment and strategic Holding* nama Perusahaan resmi menjadi PT Pupuk Indonesia (Persero) yang sebelumnya bernama PT Pupuk Sriwidjaja (Persero).²²

Pupuk Indonesia ini memiliki beberapa anggota holding, diantaranya:

1) PT Petrokimia Gresik

PT Petrokimia Gresik resmi berdiri pada tanggal 10 Juli 1972 dan berlokasi di kabupaten Gresik, provinsi Jawa Timur.

2) PT Pupuk Kujang Cikampek

PT Pupuk Kujang resmi berdiri pada tanggal 9 Juni 1975 dan berlokasi di Cikampek, provinsi Jawa Barat.

3) PT Pupuk Kalimantan Timur

PT pupuk Kalimantan Timur resmi berdiri pada tanggal 7 Desember 1977 dan berlokasi di Bontang, provinsi Kalimantan Timur.

4) PT Pupuk Iskandar Muda

PT Pupuk Iskandar Muda resmi berdiri pada tanggal 24 Februari 1982 dan berlokasi di Lhokseumawe provinsi Aceh.

5) PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang resmi berdiri pada tanggal 24 Desember 1959 dan berlokasi di Palembang, provinsi Sumatera Selatan.

²²Pupuk Indonesia Holding Company, "Pupuk Indonesia Holding Company", dalam pupukindonesia.com/id/profil (di akses pada 18 April 2022)

6) PT Rekayasa Industri

PT Rekayasa Industri resmi berdiri pada tanggal 12 Agustus 1981 dan berlokasi di Jakarta.

7) PT Mega Eltra

PT Mega Eltra resmi berdiri pada tanggal 28 Desember 1970 dan berlokasi di Jakarta.

8) PT Pupuk Indonesia Logistik

PT Pupuk Indonesia Logistik resmi berdiri pada tanggal 23 Desember 2013 dan berlokasi di Jakarta.

9) PT Pupuk Indonesia Energi

PT Pupuk Indonesia Energi resmi berdiri pada tanggal 18 Agustus 2014 dan berlokasi di Jakarta.

10) PT Pupuk Indonesia Pangan

PT Pupuk Indonesia Pangan resmi berdiri pada tanggal 17 Juni 2015 dan berlokasi di Jakarta.²³

C. Kerangka Konseptual

1. Upaya Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Produktivitas Pertanian

Peningkatan produksi padi masih merupakan prioritas dalam mendukung program ketahanan pangan dan agribisnis. Tingginya ongkos-ongkos produksi (pupuk, bibit, tenaga kerja, dan lain-lain), rendahnya produktivitas, serta lemahnya posisi tawar harga produksi pertanian merupakan ciri utama gagalnya pertanian di Indonesia. Dengan merujuk pada definisi agribisnis sebagai serangkaian usaha pertanian yang dimulai dari persiapan lahan, bibit, dan sumberdaya-sumberdaya

²³Permendagri Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

lainnya hingga tahapan panen serta pasca panen dan pemasaran. Sudah jelas bahwa Indonesia tidak sukses melaksanakan pembangunan pertanian itu sendiri. Dari berbagai informasi, sekurang-kurangnya ada 4 penyebab umum kegagalan dalam pembangunan pertanian di Indonesia yakni: kegagalan dalam penyediaan infrastruktur, kegagalan dalam institusi, kegagalan dalam sistem interaksi dan kegagalan dalam perihal kapabilitas para pihak. Untuk meningkatkan produksi padi berbagai cara telah ditempuh seperti memantapkan ketahanan pangan melalui penganekaragaman dan peningkatan produksi padi dengan penerapan teknologi tepat guna, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memantapkan kelembagaan petani, meningkatkan sarana dan prasarana pertanian. Proses produksi baru bisa berjalan bila persyaratan yang dibutuhkan tanaman dapat dipenuhi. Persyaratan ini lebih dikenal dengan nama faktor produksi. Faktor produksi terdiri dari empat komponen yaitu tanah, modal, tenaga kerja, dan skill atau manajemen.

Dalam proses produksi masing-masing komoditas membutuhkan faktor produksi sesuai dengan sifat genetiknya. Misalnya untuk usahatani tanaman padi seluas satu hektar, supaya produksi maksimum bisa dicapai maka masukan yang diberikan (modal) seperti jumlah bibit, pupuk, dan obatobatan harus sesuai dengan luasnya. Tidak hanya itu, cara pemberian, waktu pemberian, dan dosis atau takaran tiap pemberian juga harus tepat. Semuanya itu ditambah dengan pemilihan bibit, penyemaian, pengolahan tanah, penyiangan, pemupukann, dan lain-lainnya yang lebih lazim disebut dengan teknologi.

Dalam hal peningkatan produksi padi, kebijakan pemerintah yang harus diperhatikan yaitu kebijakan subsidi harga pupuk. Perlu diketahui bahwa dalam komponen produksi padi, pupuk menjadi faktor penentu keberhasilan, yakni

mencapai 55%. Dengan kendala sulitnya petani memperoleh suplai pupuk yang memadai, baik harga, jumlah, maupun ketepatan waktu, dibutuhkan suatu terobosan strategis di tingkat kebijakan pemerintah maupun inovasi teknologi. Selain itu, kendala lain yang dihadapi petani di Indonesia dalam mengembangkan usahanya adalah terbatasnya modal dan lemahnya akses terhadap sumber permodalan. Modal juga merupakan kendala dalam memenuhi sarana produksi tanaman terutama benih unggul, pupuk dan pestisida.

Upaya peningkatan produksi padi dan peningkatan pendapatan petani dilakukan melalui perbaikan efisiensi usaha tani dengan mengarahkan penekanan melalui perbaikan biaya produksi atau peningkatan produktivitas. Beberapa upaya yang bisa ditempuh antara lain;

- (a) Menerapkan teknologi tepat guna dan teknologi terobosan,
- (b) Pengawasan yang ketat oleh aparat pertanian,
- (c) Pengaturan dalam pengadaan dan distribusi saprodi yang efisien sehingga tersedia pada tingkat petani pada saat dibutuhkan sesuai rekomendasi teknologi,
- (d) Pengaturan dan pengembangan hubungan kelembagaan petani dan kemitraan usaha dalam rangka menjamin kepastian harga dan pasar produk yang dihasilkan petani.

2. Pengelolaan Pupuk Bersubsidi bagi Petani

Pengelolaan adalah bahasa yang biasa di pakai pada ilmu manajemen. Secara etimologis, istilah manajemen berasal dari kata management yang biasanya mengacu pada proses mengelola atau menangani sesuatu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, manajemen adalah ilmu manajemen yang

menyangkut pada proses pengelolaan dan pengolahan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.

Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaannya dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian meliputi pupuk Urea, pupuk SP 36, pupuk ZA, pupuk NPK, dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.²⁴

Pengelolaan pupuk bersubsidi pada umumnya juga tidak berubah yaitu sebagai berikut : Pupuk diproduksi oleh perusahaan di Lini I, yakni lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik dari masing-masing produsen. Selanjutnya pupuk dikirim ke Lini II yaitu lokasi gudang produsen di wilayah ibukota provinsi.

Setelah pupuk dikemas dalam kantong, maka pupuk dikirim ke lokasi gudang distributor di wilayah kabupaten/kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Produsen atau Lini III. Distributor adalah perusahaan perorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan pupuk bersubsidi dalam jumlah besar di wilayah tanggung jawabnya untuk dijual kepada Petani atau Kelompok Tani melalui Pengecer yang ditunjuknya.

Setelah dari distributor, pupuk kemudian diangkut oleh pihak distributor kepada Pengecer yang ditunjuk atau Lini IV untuk selanjutnya di jual ke Petani atau kelompok tani sesuai dengan RDKK setiap kelompok tani tanggung jawabnya masing-masing. Pengecer Resmi yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perseorangan, kelompok tani, dan badan usaha baik yang berbentuk badan hukum

²⁴Permendagri Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian

atau bukan badan hukum yang berkedudukan di kecamatan dan/atau desa yang ditunjuk oleh Distributor dengan kegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya secara langsung kepada Petani (Pusat Telaah dan Informasi Regional, 2011).

Tujuan yang ingin dicapai dalam program ini adalah untuk meringankan beban petani dalam penyediaan dan penggunaan pupuk untuk kegiatan usahanya sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian guna mendukung ketahanan pangan nasional.

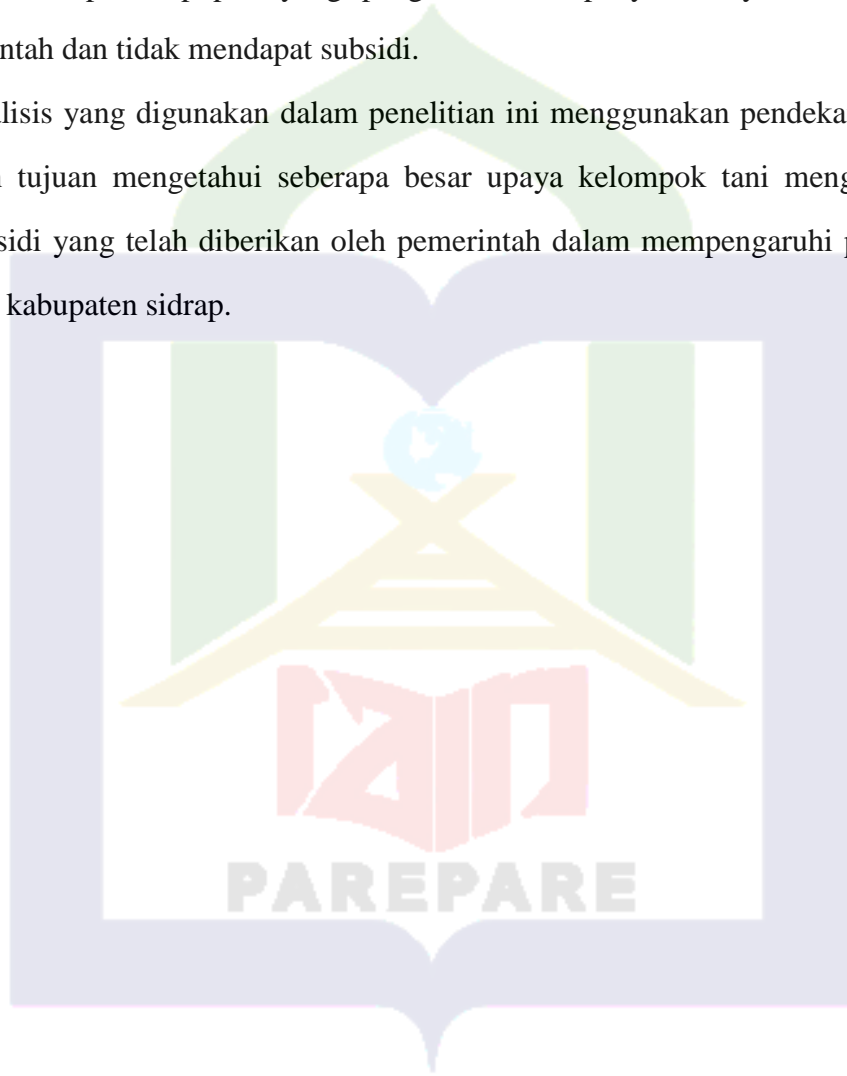
D. Kerangka Pikir

Kebijakan pupuk bersubsidi yang ditetapkan pemerintah belum memenuhi target, Dapat dilihat bahwa kebijakan pupuk bersubsidi masih belum diterapkan secara maksimal. Jika dilihat kelapangan faktanya bahwa pemberian subsidi pupuk banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga dalam pemberian ke daerah selalu mengalami kekurangan dalam pengiriman pupuk. Selain itu terkadang dari pihak penyalur pupuk atau pengecer pupuk selalu memanfaatkan momen ini sehingga pupuk yang diberi kepada petani terkadang mengalami harga yang tidak sesuai dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu petani masih sering mengalami kesulitan dalam membeli pupuk dengan harga yang sesuai, dan mereka memilih untuk mengurangi jumlah pupuk yang akan digunakan, maka hal itu berpengaruh terhadap kualitas tanam yang mereka punya dan akibatnya hasil panen mereka kurang maksimal.

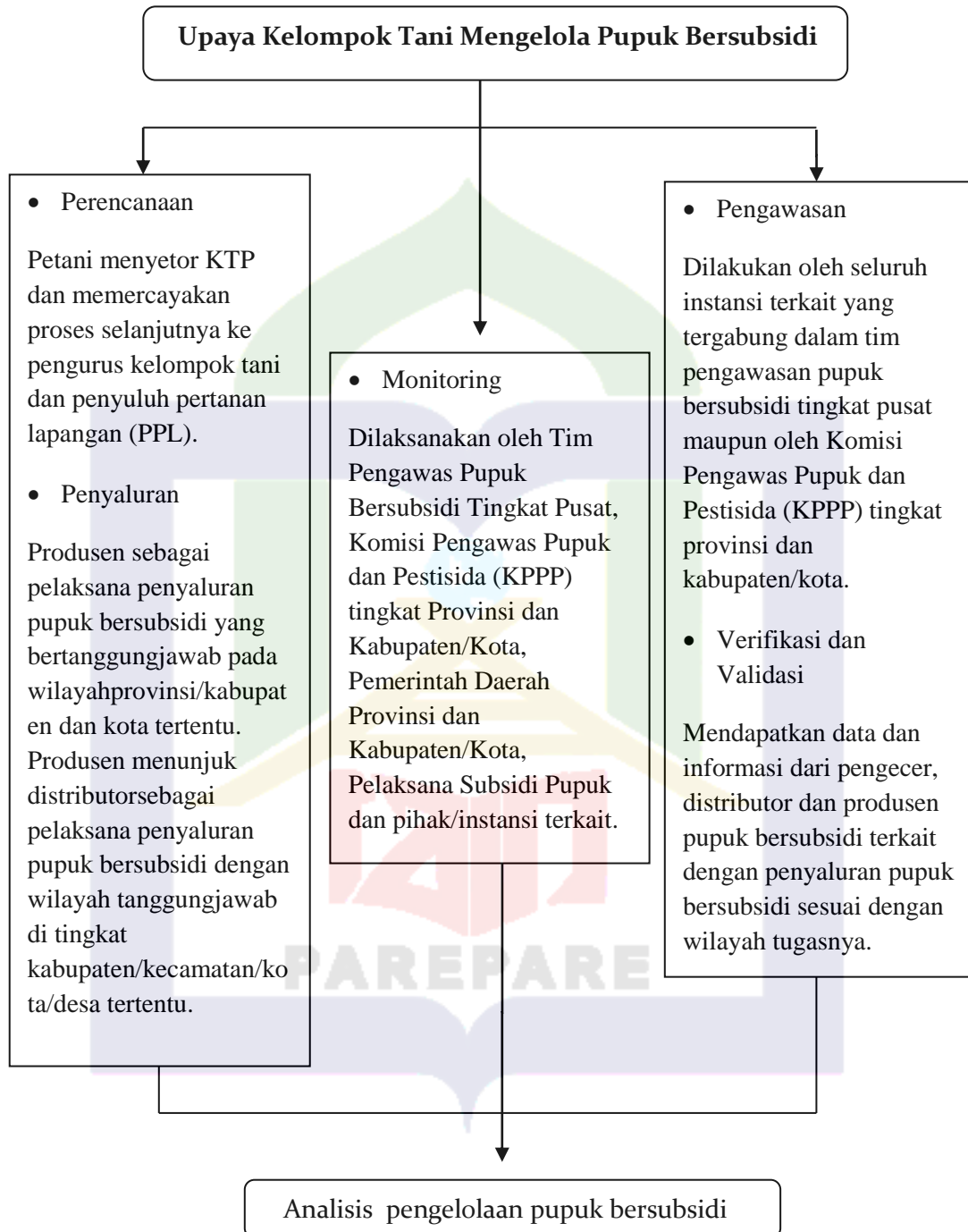
Berdasarkan penyaluran dan pengadaanya pupuk terbagi dua, yaitu pupuk bersubsidi dan pupuk non subsidi. Pupuk bersubsidi merupakan pupuk yang pengadaanya dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan

petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Menperindag) Nomor 15/M-DAG/4/2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, sedangkan pupuk non subsidi merupakan pupuk yang pengadaan dan penyalurannya di luar program pemerintah dan tidak mendapat subsidi.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan mengetahui seberapa besar upaya kelompok tani mengelola pupuk bersubsidi yang telah diberikan oleh pemerintah dalam mempengaruhi produktivitas padi di kabupaten sidrap.



BAGAN KERANGKA PIKIR



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini yaitu penelitian dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang ditujukan untuk mengenali dan memahami fenomena yang terjadi secara deskriptif terhadap subjek penelitian, misalnya perilaku, lingkungan, persepsi, motivasi, tindakan dengan cara deskripsi melalui penggambaran detail, kata-kata atau bahasa.

Metode deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan atau kondisi yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Peneliti tidak mengubah, menambah, atau mengadakan manipulasi terhadap objek atau wilayah penelitian. Peneliti hanya memotret apa yang terjadi pada objek atau wilayah yang akan diteliti, kemudian memaparkan apa yang terjadi dalam bentuk laporan penelitian secara sederhana, apa adanya. Penelitian ini juga merupakan penelitian lapangan, dimana yang dimaksud dengan penelitian lapangan adalah penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subyek yang diteliti, serta individu, kelompok atau lembaga tertentu. Dalam penelitian kualitatif sebagian besar aktivitasnya berada di lapangan yang mengharuskan peneliti lebih dekat dengan orang-orang yang berada di lingkungan penelitian, agar informasi yang didapatkan sesuai dengan realita yang ada.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian secara umum memerlukan lokasi dan waktu dalam pengerjaannya. Dalam penelitian ini penulis telah melakukan penelitian yang berlokasi di Desa

Carawali, Kecamatan Watang pulu, Kabupaten Sidrap. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut karena lokasi tersebut memenuhi variabel yang telah penulis susun yaitu adanya upaya kelompok tani mengelola pupuk bersubsidi. Waktu penelitian yang akan penulis lakukan kurang lebih 2 bulan dan mengikuti kalender akademik dalam menyelesaikan pendidikan strata satu.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini memiliki fokus pada upaya kelompok tani mengelola pupuk bersubsidi dan bentuk pengelolaan pupuk bersubsididi Desa Carawali Kecamatan Watang pulu Kabupaten Sidrap.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang secara otomatis memerlukan jenis data yang bersifat kualitatif juga. Data kualitatif merupakan data yang terkumpul dalam bentuk kata-kata atau gambar, tidak seperti data kuantitatif yang lebih berbentuk angka-angka. Data kualitatif mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi, video tape, dokumen pribadi, memo, dan rekaman-rekaman resmi lainnya.²⁵

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa data-data yang berbentuk kata-kata baik lisan maupun tulisan, serta data yang berbentuk gambar (data visual). Sumber data merupakan segala hal yang memberikan informasi terkait penelitian yang dilakukan. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah wawancara berupa kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen

²⁵Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), h. 3.

lain.²⁶Sumber data memiliki berbagai macam bentuk diantaranya seperti orang-orang yang memiliki informasi yang disebut dengan istilah narasumber, informan, atau responden. Dalam penelitian ini sumber data dibagi dalam dua garis besar yaitu :

a) Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁷ Data tersebut diperoleh dari proses peninjauan langsung pada objek penelitian yang ada dilapangan, dan data tersebut harus dicari melalui narasumber atau responden, yaitu orang yang dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi ataupun data mengenai penelitian. Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek peneliti dan dengan observasi atau pengamatan langsung dilapangan. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan responden dan hasil pengamatan langsung dilapangan. Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah *sampling purposive* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu. Informan dalam penelitian ini yaitu Pengurus Kelompok tani dan anggotanya.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data pendukung yang diharapkan memenuhi rumusan penelitian yang sedang dikerjakan. Data sekunder diperoleh dari berbagai macam sumber yang berkaitan dengan penelitian yang dikerjakan. Data sekunder yang biasanya digunakan dalam penelitian seperti buku, laporan, jurnal, literatur, situs internet, serta informasi dari beberapa instansi yang terkait. Adapun data

²⁶Radial, *Paradigma Dan Model Penelitian Komunikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), h. 359.

²⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Parepare: IAIN Parepare, 2020), h. 23.

sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur-literatur ilmiah, buku, jurnal, hasil penelitian kemahasiswaan (skripsi, disertasi, dan tesis), serta artikel online dari situs internet.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Mengumpulkan data merupakan langkah yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan penelitian dengan pendekatan apapun, pengumpulan data menjadi satu fase yang sangat strategis bagi dihasilkannya penelitian yang bermutu. Ketepatan dan kelengkapan data sangat dibutuhkan agar mampu mencapai hasil penelitian yang memuaskan. Dalam penelitian ini penulis akan terlibat langsung dalam penelitian (penelitian lapangan/*field research*). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Dalam mengambil data observasi memiliki jenis pengumpulan data ialah, observasi partisipan yaitu peneliti yang melakukan observasi secara langsung terhadap objek yang diteliti, observasi sistematis yaitu observasi yang dilakukan yang telah ditentukan kerangkanya, observasi eksperimental yaitu observasi yang telah dipersiapkan sedemikian rupa sehingga situasi itu dapat diatur sesuai dengan tujuan penelitian.²⁸Dengan demikian, pengamat (observer) menggunakan seluruh pancaindera untuk mengumpulkan data melalui interaksi langsung dengan orang yang diamati. Pengamat harus menyaksikan secara langsung semua peristiwa/gejala yang sedang diamati. Adapun hal yang

²⁸ Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h. 72.

akandiobservasi dalam penelitian ini adalah srategi kelompok tani dalam meningkatkan hasil pendapatan melalui subsidi pupuk.

2. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Adapun jenis wawancara dalam penelitian kualitatif ada dua, yaitu tidak terpimpin dan terpimpin. Wawancara tidak terpimpin adalah wawancara yang tidak terarah. Wawancara terpimpin ialah tanya-jawab yang terarah untuk mengumpulkan data-data yang relevan saja.²⁹ Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal. Wawancara penelitian lebih dari sekedar percakapan dan berkisar dari informal ke formal.³⁰

Wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau kelompok peneliti untuk dijawab. Wawancara yang dilakukan guna mendapatkan informasi yang lebih dalam dengan melakukan proses penggalian informasi dengan memberikan pertanyaan terbuka terhadap responden yang terkait. Metode wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terpimpin atau semi terstruktur, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terpimpin atau terstruktur.³¹

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode

²⁹ Husaini Usman & Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), h. 94.

³⁰ Imami Nur Rachmawati, Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara, (*Jurnal Keperawatan Indonesia*, Volume 11 , Nomor 1, 2017), h. 35.

³¹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Solo: Cakra Books, 2014), h. 125.

dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Studi dokumen merupakan peristiwa-peristiwa yang telah berlalu, dokumen tersebut dapat berupa gambar, tulisan, dan karya-karya monumental dari seseorang.³² Pada penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data-data yang bersumber dari dokumentasi tertulis, yang sesuai dengan keperluan penelitian sekaligus menjadi pelengkap agar data yang diperoleh lebih objektif. Dokumen merupakan data pendukung terhadap hasil pengamatan wawancara, misal foto dan laporan kegiatan yang memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar, serta foto kegiatan perekrutan karyawan.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan.³³ Uji keabsahan data penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility* (validasi interbal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (objektivitas). Kriteria uji keabsahan tersebut dapat dijadikan tolak ukur untuk bisa mendapatkan sebuah kesimpulan yang menjamin ke validan sebuah data yang diperoleh peneliti.

³² Ekky Maria Farida Sani, Pemanfaatan *Buletin Putakawan* Oleh Pustakawan Di Kota Semarang, (*Jurnal Ilmu Perpustakaan*, Volume 2, Nomor 3, 2013), h. 5-6.

³³ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (Makalah dan Skripsi), (Parepare: IAIN Parepare, 2020), h. 23.

1. Derajat Kepercayaan (*Credibility*)

Kredibilitas yang digunakan dalam penelitian ini dapat menjelaskan sebuah data sehingga mampu membuktikan kesesuaian antara hasil pengamatan dan realitas dilapangan, apakah data atau informasi yang diperoleh sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.

2. Kebergantungan (*Dependency*)

Dependency adalah sebuah kriteria dalam menilai apakah proses penelitian bermutu atau tidak. Proses dapat meminjam temuan peneliti apakah temuannya dapat dipertahankan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Uji *dependency* dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian.

3. Kepastian (*Comfirmability*)

Confirmability merupakan kriteria penelitian untuk menilai kualitas hasil penelitian dengan penekanan pada pelacakan data dan informasi serta interpretasi yang didukung oleh materi yang ada pada penelusuran dan pelacakan.

4. Triangulasi

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Terkait dengan pemeriksaan data, triangulasi berarti suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan cara memanfaatkan hal-hal (data) lain untuk pengecekan atau perbandingan data. Hal-hal lain yang dipakai untuk pengecekan dan perbandingan data itu adalah sumber, metode, peneliti, dan teori. Dalam penelitian kualitatif dikenal empat jenis teknik triangulasi yaitu triangulasi sumber (*data triangulation*), triangulasi peneliti (*investigator triangulation*), triangulasi metodologis (*methodological triangulation*), dan triangulasi teoretis (*theritical*

triangulation).³⁴Pada penelitian ini uji keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti ialah uji *credibility*, yang dilakukan dengan teknik triangulasi.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data sebagai “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain, untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna”.³⁵

Dari pengertian di atas, terdapat beberapa hal yang perlu digaris bawahi, yaitu upaya mencari data adalah proses lapangan dengan berbagai persiapan pralapanan tentunya, menata secara sistematis hasil temuan di lapangan, menyajikan temuan lapangan, mencari makna, artinya bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi hingga tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Disini perlunya peningkatan pemahaman bagi peneliti terhadap kejadian atau kasus yang terjadi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah model analisis data yang dikembangkan oleh Miles & Huberman, bahwasanya aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan verifikasi data (*conclusion drawing/verification*).

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari

³⁴Sumasno Hadi, Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi, (*Jurnal Ilmu Pendidikan*, Jilid 22, No. 1, 2016), h. 75.

³⁵Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, (*Jurnal Alhadharah*, Vol.17, No. 33, 2018), h. 84.

catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.³⁶ Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.³⁷

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Namun yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif ialah dengan teks yang bersifat naratif.³⁸ Penyajian data dilakukan secara sistematis agar lebih mudah dipahami kaitan antara data-data yang ada sehingga nantinya lebih mudah untuk menarik kesimpulan.

c. Verifikasi

Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa verifikasi data dan penarikan kesimpulan adalah upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan untuk melibatkan pemahaman peneliti.

³⁶ Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, h. 91.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 247.

³⁸ Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, (*Jurnal Alhadharah*, Vol.17, No. 33, 2018), h. 94.

Penarikan kesimpulan pada tahap ini proses usaha mencari makna dari komponen yang disajikan dengan melakukan pengecekan ulang, dimulai dari pelaksanaan survey (orientasi), wawancara, observasi, dokumentasi, dan membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil penelitian yang telah dilakukan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Kelompok Tani Mengelola Pupuk Bersubsidi

Penelitian merujuk pada rumusan masalah pertama yaitu upaya kelompok tani dalam mengelola pupuk bersubsidi sebagai fokus utama penelitian ini. Upaya kelompok tani memberdayakan anggotanya, tidak semata-mata untuk meningkatkan kemampuan diri anggota, namun lebih dari itu untuk mendorong anggota bersedia mengikuti perkembangan yang terjadi. Sebagai ilustrasi misalnya perkembangan cara berusaha tani mengenai pemahaman tentang penggunaan pupuk organik sebagai pengganti bahan-bahan kimia atau pupuk non organik, atau penggunaan traktor sebagai pengganti cangkul. Ini merupakan bentuk nyata penerapan upaya dalam memberikan pemahaman yang positif kepada anggota kelompok tani.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti beberapa tahapan upaya nyata yang dilakukan oleh para petani sebagai wujud dari upaya pengelolaan pupuk bersubsidi yaitu sebagai berikut:

1. Pertemuan pengurus kelompok tani yang terdiri dari ketua kelompok tani, sekretaris, bendahara dan kepala-kepala seksi.

Berdasarkan hasil penelitian, tahapan awal sebagai wujud dari upaya kelompok tani yaitu dilakukannya pertemuan diantara para pengurus kelompok tani, Desa Carawali menjadi salah satu desa dengan pengelolaan kelompok tani yang cukup efektif dinilai dari aspek kerjasama dan gotong royong yang baik diantara kelompok tani.

2. Musyawarah anggota kelompok tani dipimpin oleh ketua kelompok tani

Tahapan selanjutnya yaitu para anggota kelompok tadi mengambil tindakan berupa menyusun daftar kebutuhan riil pupuk bersubsidi yang akan dibeli dan digunakan dari tiap anggota kelompok tani dengan menetapkan jumlah, jenis pupuk dan waktu pupuk tersebut dibutuhkan. Daftar yang disusun akan berfungsi sebagai pesanan petani/kelompok tani kepada pengecer resmi di Lini IV.

3. Pertemuan pengurus kelompok tani untuk membahas dan merumuskan RDKK

Tahapan selanjutnya yaitu para pengurus kelompok tani kemudian meimplementasikan hasil musyawarah bersama dengan menampung hasil musyawarah anggota kelompok tani tentang rencana kebutuhan kelompok tani.

4. Meneliti kelengkapan RDKK dan penandatanganan RDKK

Selanjutnya yaitu menyusun serta melengkapi RDKK oleh Ketua kelompok tani yang diketahui oleh Kepala Desa dan disetujui oleh Kepala Cabang Dinas Pertanian (KCD) atau Pertanian Penyuluh Lapangan (PPL).

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa secara umum pengelolaan dan upaya yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur dari pengelolaan pupuk organik yang dicanangkan oleh pemerintah, ketersediaan pupuk organik di Desa Carawali menjadi salah satu perhatian khusus dari pemerintah setempat.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa penyaluran pupuk bersubsidi diatur oleh pemerintah yaitu dengan sistem terbuka, dimana petani dapat langsung membeli pupuk ke pengecer resmi. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui efektivitas pupuk bersubsidi. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Burhanuddin.B bahwa :

“Pembagian pupuk bersubsidi harus lebih ketat pengawasannya karena banyak anggota petani yang tidak terdaftar dalam RDKK bebas mengambil pupuk yang bersubsidi.”³⁹

Efektifitasan pupuk bersubsidi tersebut dinilai sangat efektif untuk mengurangi jumlah besaran pengeluaran yang dilakukan oleh para petani di Desa Carawali khususnya.

Salah satu informan yaitu Bapak Jamal menyebutkan bahwa:

“Pembelian pupuk ini sangat efektif jika dilakukan di distributor resmi yang juga menjual pupuk sesuai dengan harga pupuk yang di subsidi oleh pemerintah.”⁴⁰

Pengawasan secara ketat perlu untuk dilakukan oleh pemerintah mengingat bahwa banyaknya distributor yang secara curang meninggikan harga pupuk sebagai upaya untuk mengambil keuntungan yang besarr pula, hal tersebut dilakukan karena ada kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi kecurangan dilapangan.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan dan juga merujuk pada hasil wawancara bahwa adapun beberapa upaya yang dilakukan oleh kelompok tani dalam mengelola pupuk bersubsidi di Desa Carawali yaitu :

- a. Kelompok tani memberikan edukasi atau penjelasan kepada anggota dan petani lainnya supaya bisa mengelola pupuk sesuai dengan kebutuhan tanaman padinya.

Upaya yang dilakukan oleh para kelompok tani di Desa Carawali secara umum yaitu dengan memberikan edukasi terkait dengan penggunaan pupuk sesuai takaran kebutuhannya baik kepada para petani maupun secara individual

³⁹Burhanuddin.B. (44). Anggota Kelompok Tani. Wawancara di Carawali tanggal 28 Juli 2022

⁴⁰Jamal. (41). Anggota Kelompok Tani. Wawancara di Carawali tanggal 28 Juli 2022

diri sendiri dengan tujuan untuk manajemen seluruh penggunaan pupuk bersubsidi tersebut.

Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk penegasan bahwa kurangnya perhitungan penggunaan pupuk bersubsidi bagi petani membuat mereka kewalahan dalam mengatasi ketersediaan pupuk bagi padi yang mereka tanam.

Hal tersebut dijelaskan pada hasil wawancara bersama bapak Muhammad Jafar bahwa:

“Salah satu bentuk upaya itu adalah dengan mengurangi atau berhemat dalam menggunakan pupuk bersubsidi supaya tidak cepat habis”⁴¹

Ketersediaan pupuk bersubsidi yang juga secara umum masih harus sesuai dengan kebutuhan disuatu daerah membuat para petani terkadang harus menambah jumlah pupuk mereka secara terpaksa membeli pupuk non subsidi yang secara umum harganya lebih tinggi dibanding harga pupuk subsidi.

Jika kemudian dikaitkan dengan hasil wawancara pada narasumber lainnya. Sebagaimana sesuai dengan hasil wawancara oleh bapak Muhammad Yunus beliau mengatakan :

“Petani sekarang banyak yang tidak tahu berapa banyak kebutuhan pupuk yang diperlukan untuk tanaman padinya.”⁴²

Kurangnya edukasi yang dilakukan membuat para petani kewalahan dalam merencanakan kebutuhan pupuk mereka sendiri, akibatnya kekurangan

⁴¹Muhammad Jafar. (48). Anggota Kelompok Tani. Wawancara di Carawali tanggal 28 Juli

⁴²Muhammad Yunus. (66). Anggota Kelompok Tani. Wawancara di Carawali tanggal 28 Juli

pupuk membuat mereka harus bersabar dan membeli pupuk tambahan yang berpeluang harganya lebih tinggi dari harga pupuk bersubsidi.

- b. Mengadakan penyuluhan ke petani lainnya tentang manfaat dari pupuk organik.

Upaya selanjutnya yaitu upaya penyuluhan kepada petani agar kemudian dapat menggunakan pupuk yang diolah secara mandiri, agar penggunaan pupuk kimia dikurangi. Pengurangan penggunaan pupuk kimia walaupun disubsidi harganya namun hasil yang diperoleh juga masih sangat berbeda dibandingkan dengan pupuk organik.

Sebagaimana sesuai dengan hasil wawancara oleh bapak Jamal beliau mengatakan :

“Yah petani itu harus pintar pintar mengolah pupuk, makanya kami berupaya untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia baru kami menggunakan pupuk organik yang dibuat sendiri.”⁴³

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa petani mengupayakan untuk dapat mengolah pupuk secara organik sendiri, hal tersebut mengurangi adanya penggunaan pupuk kimia yang dinilai tidak terlalu efektif pada penggunaannya disisi lain harga yang di berikan juga tergolong tinggi.

Efektifitasan penggunaan pupuk organik dinilai sangat baik uuntuk pertumbuhan tanaman terlebih lagi penggunaan pupuk organik untuk jenis tanaman yang dikonsumsi secara rutin lebih direkomendasikan dibanding dengan penggunaan pupuk kimia.

Upaya penyuluhan kepada para petani masih saja terus dilakukan hingga penelitian ini dilakukan, upaya tersebut dinilai akan sangat efektif bagi para

⁴³Muhammad Hasbi. (39). Anggota Kelompok Tani. Wawancara di Carawali tanggal 28 Juli 2022

petani, namun beberapa petani mengeluhkan problem dari pembuatan pupuk secara organik mandiri, sebagaimana hasil wawancara oleh bapak Dion bahwa:

“Penggunaan pupuk organik memang bagus namun juga masih perlu adanya penyuluhan agar supaya kualitas pupuk ini juga memberikan hasil yang maksimal, agar kemudian hasil panen juga melimpah nantinya”⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diatas bahwa para petani dengan melakukan pembuatan pupuk organik secara mandiri yang dapat meminimalisir pengeluaran mereka maka tentunya diharapkan juga peranan dari pemerintah sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan agar tercapai hasil pupuk organik yang berkualitas.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti juga membahas terkait dengan bentuk pengelolaan pupuk bersubsidi yang menjadi fokus penelitian ini yaitu melalui beberapa tahapan yang telah dijelaskan sebelumnya namun kenyataannya yang terjadi dilapangan mekanisme pupuk bersubsidi sekarang sangat rentan terhadap penyelewengan seperti pengecer yang menjual pupuk bersubsidi tidak memasang papan nama dan papan HET sehingga pupuk bersubsidi dijual dengan harga di atas HET, beberapa petani dengan luas lahan lebih dari 2 (dua) hektare masih terdaftar dalam RDKK dan mendapatkan pupuk bersubsidi, produsen melakukan penyaluran pupuk bersubsidi ke pengecer tidak sesuai dengan dokumen pemesanan, keterlambatan distribusi, kelangkaan, penimbunan penjualan pupuk bersubsidi di luar wilayah distribusinya.

⁴⁴Dion. (32). Anggota Kelompok Tani. Wawancara di Carawali tanggal 28 Juli 2022

Salah satu problematika yang kemudian sering dirasakan oleh para kelompok tani, hal ini bisa terjadi dalam pendistribusian pupuk bersubsidi dikarenakan belum ada tindakan yang nyata berupa sanksi tegas terhadap pelaku penyelewengan tersebut. Sedangkan terkait aspek pengawasan, Komisi Pengawas Pupuk di tingkat provinsi maupun kabupaten tidak melihat dan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat dan optimal. Mereka tidak memahami sepenuhnya tugas dan fungsinya, tidak membuat laporan pengawasan, serta kurangnya dana untuk melakukan pengawasan, dimana seharusnya pengawasan distribusi pupuk bersubsidi dilakukan mulai dari hilir ke hulu, atau mulai dari produsen pupuk sampai dengan petani.

Secara keseluruhan proses distribusi pupuk bersubsidi menurut anjuran dari pemerintah dengan yang terjadi di lapangan tidaklah berbeda. Hanya saja pembuatan RDKK di lapangan harus benar-benar dilakukan dan harus di rekapitulasi banyak pihak. Namun, kondisi eksisting dilapangan dapat menimbulkan banyak masalah di beberapa saluran distribusinya. Seperti dalam melaksanakan pengangkutan pupuk bersubsidi, Distributor wajib menggunakan sarana angkutan yang terdaftar khusus sebagai angkutan pupuk bersubsidi dan pengecer dilarang memperjual belikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya. Pihak lain selain produsen, distributor, dan pengecer resmi dilarang memperjual belikan pupuk bersubsidi dengan maksud dan tujuan apa pun. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyelundupan dan penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi. Tetapi di kasus seperti ini masih saja terjadi dan tidak memenuhi aturan tepat. Di Desa Carawali sendiri petani mengatakan masih di temukan harga pupuk di

atas HET, pembelian pupuk keluar daerah karna tidak kebagian, serta tidak sesuaiya pupuk bersubsidi dengan RDKK. Dan petani tidak bisa melaporkan kejadian ini meraka hanya pasrah saja selagi meraka masih bisa mendapatkan sebagian walaupun tidak sesuai pemesanan.

Sedangkan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi seharusnya dilakukan oleh Komisi Pengawas Pupuk dan Pesticida (KPPP).KPPP provinsi/kabupaten adalah wadah koordinasi instansi lintas sektor yang dibentuk oleh Keputusan Gubernur/Bupati untuk melakukan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayah provinsi/kabupaten.KPPP kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh. Namun di daerah penelitian tim pengawas atau KPPP tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kurangnya pengawasanlah yang menimbulkan masalah distribusi pupuk tidak pernah berhenti.

B. Bentuk Pengelolaan Pupuk Bersubsidi

Hasil penelitian selanjutnya yaitu berkaitan dengan bentuk pengelolaan pupuk bersubsidi, beberapa hasil wawancara yang dilakukan serta pengamatan secara langsung dilakukan di lokasi penelitian. Adapun beberapa bentuk pengelolaan pupuk bersubsidi yang ada di Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap antara lain :

a. Perencanaan

Di tahap perencanaan, sebagian petani berada di posisi yang pasif. Mereka hanya menyeter KTP dan memercayakan proses selanjutnya ke pengurus kelompok tani dan penyuluh pertanian lapangan (PPL).

Penjelasan tersebut didukung oleh hasil penelitian yang disampaikan oleh anggota kelompok tani bahwa:

“Tahapan pertama dalam proses pengadaan pupuk itu adalah pencatatan, kita melakukan pencatatan kepada seluruh anggota tani yang membutuhkan dengan jumlah dan frekuensi kebutuhan berapa, semuanya dicatat dengan baik lalu nanti di ajukan kepada penyuluh pertanian lapangan”⁴⁵

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa tahapan awal yang dilakukan oleh kelompok tadi dalam upaya benmtuk pengelolaan pupuk ini adalah tahapan perencanaan yang meliputi kegiatan pencatatan kebutuhan pupuk petani.

Selanjutnya berkaitan dengan kebutuhan yang diajukan tersebut kemudian diperiksa oleh petugas lapangan, pemeriksaan tersebut meninjau seberapa layak jumlah frekuensi yang dibutuhkan dengan jumlah yang dicantumkan.

Secara umum bahwa dijelaskan dalam hasil wawancara bahwa:

“Selama ini, kita tidak pernah tahu berapa jumlah takaran jatah pupuk yang diberikan kepada kita, nanti dipihak pertanian kabupaten yang membagi sesuai dengan kebutuhan yang diajukan, kadang jumlahnya pas kadang juga kekurangan”⁴⁶

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa kebutuhan yang direncanakan terkadang tidak sesuai dengan jumlah pupuk yang tiba, kebutuhan yang telah dicatat sebagai kebutuhan daerah tentunya tidak secara merata

⁴⁵Muhammad Jafar. (48). Anggota Kelompok Tani. Wawancara di Carawali tanggal 28 Juli

⁴⁶Dion. (32). Anggota kelompok tani. Wawancara di Carawali tanggal 28 Juli 2022

dibagikan kepada daerah daerah, walaupun telah dituliskan terkait dengan kebutuhan dan rencana kebutuhan tersebut.

“Tahapan perencanaan itu penting karena memang banyak yang perlu untuk di data soal kebutuhan pupuk didaerah masing masing, makanya memang sangat perlu dilakukan tahapan perencanaan pertama kali”⁴⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa petani tidak tahu jatah pupuk yang diterimanya. Manipulasi data RDKK terjadi hampir semua wilayah sebagaimana temuan Ombudsman RI (ORI) pada Desember 2021 ada 369.688 warga yang meninggal yang masuk data awal e-RDKK tahun 2021. Petani yang tercantum dalam RDKK sekalipun tidak mendapatkan pupuk bersubsidi. Padahal Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 menyebutkan, pupuk bersubsidi hanya untuk petani terdaftar di RDKK.

b. Penyaluran

Pengelolaan kedua yaitu tahapan penyaluran yang dilakukan, pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Dalam menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, menteri menugaskan PT. Pupuk Indonesia untuk melaksanakan hal tersebut bagi kelompok tani dan/atau petani berdasarkan perjanjian kementerian pertanian dengan PT. Pupuk Indonesia (Persero).

⁴⁷Iskandar. (50). Ketua Kelompok Tani. Wawancara di Carawali tanggal 28 Juli 2022

Berdasarkan data diatas bahwa penyaluran yang dilakukan merupakan bentuk realisasi dari tahapan perencanaan yang dilakukan sebelumnya, berdasarkan seluruh penjelasan terkait dengan hasil peneltiian sebelumnya bahwa tahapan pengelolaan pupuk yaitu:

“Setelah dilakukan perencanaan lalu kemudian dilakukan penyaluran, penyaluran itu biasanya tidak dilakukan secara sekaligus, biasanya itu bertahap, beberapa kali itu penyalurannya dilakukan hanya setengah dulu kemudian dilakukan lagi penyaluran selanjutnya”⁴⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa tahapan penyaluran tidak dilakukan sekaligus dimana pihak kelompok tani disini bertugas untuk melakukan pengawasan serta melakukan koordinasi lebih kepada pihak pertanian kabupaten untuk mendapatkan penyaluran pupuk sesuai dengan kebutuhan wildayahnya.

Penjelasan terkait dengan penyaluran dimana kelompok tani bertugas untuk mengawasi dan meninjau secara langsung seluruh hal terkait dengan proses penyaluran pupuk tersebut hingga ketangan petani.

Secara hasil peneltiian dan pengamatan yangd dilakukan peneliti bahwa salah satu pengirim dan pengelolah pupuk bersubsidi ialah PT. Pupuk Indonesia (Persero) yang menetapkan produsen sebagai pelaksana pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang bertanggung jawab pada wilayah provinsi/kabupaten dan kota tertentu. Produsen menunjuk distributor sebagai pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi dengan wilayah tanggung jawab di tingkat kabupaten/kecamatan/kota/desa tertentu.

⁴⁸Iskandar. (50). Ketua Kelompok Tani. Wawancara di Carawali tanggal 28 Juli 2022

Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi diawasi oleh tim pengawas, yakni tim pengawas pupuk bersubsidi pada tingkat pusat, yang anggotanya terdiri dari instansi terkait di pusat yang ditetapkan oleh menteri penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertanian. Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan Pasal (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 meliputi jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu.

c. Pengawasan

Tahapan pengelolaan selanjutnya ialah pengawasan secara internal dan terstruktur kepada seluruh pihak yang bertugas dalam pengadaan dan pengelolaan pupuk tersebut, sebagaimana dijelaskan bahwa pengawasan dinilai sangat penting dalam upaya pengelolaan pupuk sebagai kebutuhan primer petani.

“Tahapan selanjutnya itu pengawasan karena memang pengawasan disini yang penting, banyak sebenarnya orang-orang yang melakukan kecurangan untuk pengalokasian pupuk ini, jadi perlu adanya yang namanya pengawasan”⁴⁹

Pengawasan yang dilakukan secara umum itu adalah pengawasan terhadap seluruh aspek yang bercimpung dalam urusan pengadaan pupuk ini, bentuk pengelolaan sebenarnya adalah dimana seluruh pihak kelompok petani melakukan tugasnya sebagai kelompok petani untuk membantu masyarakat dan anggota kelompoknya untuk mencapai kesejahteraan dari pengadaan pupuk tersebut.

⁴⁹Iskandar. (50). Ketua Kelompok Tani. Wawancara di Carawali tanggal 28 Juli 2022

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bahwa:

“Seluruh kelompok tani itu melakukan tugasnya untuk mengawasi seluruh proses pengadaan pupuk yang disalurkan melalui perusahaan pupuk memang, jadi kita semua harus mengawasi agar tidak terjadi kecurangan tersebut”⁵⁰

Pengawasan pupuk bersubsidi dilakukan oleh seluruh instansi terkait yang tergabung dalam tim pengawasan pupuk bersubsidi tingkat pusat maupun oleh Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Komitmen dan peran aktif pemerintah daerah melalui optimalisasi kinerja tim pengawas dan KPPP baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam pengawalan dan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi sangatlah diharapkan untuk menjamin penyaluran pupuk bersubsidi agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

d. Monitoring

Tahapan pengelolaan selanjutnya ialah monitoring dimana tahapan ini merujuk pada aspek monitoring, aspek monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan oleh Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat, Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pelaksana Subsidi Pupuk dan pihak/instansi terkait. KPPP di kabupaten/kota menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan

pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati/Walikota setiap bulan. Bupati/ Walikota dan KPPP Provinsi menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi setiap bulan kepada Gubernur.

Sebagaimana dijelaskan dalam hasil wawancara bahwa:

“Aspek monitoring disini disebutkan sebagai suatu upaya dimana seluruh pihak memang melakukan monitoring secara bersama itu pastinya, kalau soal monitoring itu kita kelompok tadi hanya sebatas melakukan pengawasan karena monitoring ini pihak diatas yang melakukan, namun ita tetap mengingatkan kembali”⁵¹

Perkembangan pelaksanaan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi serta berbagai permasalahan dan upaya antisipasinya di masing-masing provinsi diharapkan dapat dilaporkan oleh Gubernur kepada Menteri Pertanian c.q. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian setiap bulan.

Hal senada juga disampaikan dalam hasil wawancara bahwa:

“Salah satu tugas ita sebagai kelompok tani adalah pengawasan dan monitoring juga, bagaimana hak hak pupuk bersubsidi ini bisa sampai ditangan para petani sesuai dengan kebutuhan mereka pastinya”⁵²

Satuan Kerja Propinsi atau Kabupaten/Kota yang memperoleh alokasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi

⁵¹Iskandar. (50). Ketua Kelompok Tani. Wawancara di Carawali tanggal 28 Juli 2022

⁵²Muhammad Jafar. (48). Anggota Kelompok Tani. Wawancara di Carawali tanggal 28 Juli 2022

Tahun Anggaran 2020, diwajibkan membuat laporan realisasi anggaran dan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya.

e. Verifikasi dan Validasi Penyaluran

Penetapan Tim Verifikasi dan Validasi Kegiatan Pendampingan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan kapasitas SDM dan fungsi tugas sehari-hari. Jumlah anggota Tim verifikasi tingkat Kecamatan minimal 2 (dua) orang.
- 2) Tim Pembina Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota. Jumlah anggota Tim Pembina Kabupaten/Kota minimal 3 (tiga) orang.
- 3) Tim Pembina Provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi. Jumlah Tim Pembina Provinsi minimal 3 (tiga) orang.
- 4) Apabila jumlah Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dan Tim Pembina Provinsi/Kabupaten/ Kota dinilai kurang memadai maka jumlah tim dapat ditambah dengan menggunakan dana APBD I dan/atau APBD II.
- 5) Tim Verifikasi dan Validasi Pusat ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Subsidi Pupuk Tahun Anggaran 2021.

Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) merupakan konsep pesanan yang ditetapkan oleh pemerintah dan diberlakukan mulai tahun 2006 sampai sekarang. Konsep ini di berlakukan dengan tujuan agar petani dapat memperoleh pupuk dengan harga murah sehingga dapat

meningkatkan kesejahteraan petani agar petani dapat memperoleh pupuk bersubsidi dengan tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu. Dalam program penyaluran pupuk bersubsidi, keberhasilan pupuk subsidi dikatakan efektif jika pupuk tersebut memenuhi asas 6 tepat yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, tepat mutu dan dikatakan tidak berhasil jika pupuk tersebut tidak memenuhi asas 6 tepat.

Distribusi pupuk bersubsidi bagi petani tidak selamanya lancar. Tidak semua wilayah dapat menjangkau pupuk dengan cepat distribusi yang lancar. Salah satu solusi yang dilakukan dengan mengolah pupuk organik yang dibuat secara mandiri agar mengurangi pemakaian pupuk kimia dan menutupi kelangkaan pupuk bersubsidi.

Pemerintah mengurangi alokasi pupuk kimia bersubsidi tahun 2020 yang hanya 7,9 ton lebih sedikit dari tahun 2019 sebanyak 8,8 ton. Akibatnya kelangkaan pupuk bersubsidi terjadi di semua daerah di Indonesia. Termasuk di Desa Carawali, selain ada pengurangan alokasi anggaran pupuk bersubsidi faktor lainnya karena lemahnya pengawasan distribusi pupuk. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Iskandar Ketua Kelompok Tani mengatakan bahwa:

“Apabila pupuk nya langka terus pasti para petani akan sulit dalam menggarap tanaman padinya. Maka dari itu, saya mendorong anggota saya dan petani lainnya untuk memanfaatkan atau mengolah sampah plastik, kotoran sapi dan kotoran kambing untuk diolah menjadi pupuk organik agar mengurangi pemakaian pupuk kimia yang bisa merusak kesuburan tanah.”⁵³

⁵³Iskandar. (50). Ketua Kelompok Tani. Wawancara di Carawali tanggal 28 Juli 2022

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa adanya masalah kelangkaan pupuk bersubsidi dan petani merasa masih kurang dengan pupuk yang diberikan karena petani mau menggunakan pupuk lebih dari jumlah yang ditetapkan untuk lebih meningkatkan pendapatan tetapi tidak bisa karena pupuk bersubsidi sangat di batasi oleh pemerintah.

Maka dari itu salah satu bentukbentuk pengolahan pupuk bersubsidi yaitu dengan cara kelompok tani memanfaatkan atau mendaur ulang sampah plastik, kotoran sapi dan kotoran kambing untuk dijadikan pupuk organik yang dibuat secara mandiri.

Jika merujuk dari hasil penelitian yang dilakukan, beberapa temuan hasil penelitian lainnya yang mendukung penelitian ini yaitu peranan kelompok tani dalam efektivitas distribusi pupuk bersubsidi dinilai sangat efektif sebagai bentuk pengelolaan dan pengawasan harga yang beredar dilapangan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan para petani dalam memberdayakan pupuk organik dinilai lebih efektif walaupun secara fakta dilapangan menunjukkan untuk penggunaannya pada beberapa jenis tanaman padi. Pengelolaan pupuk bersubsidi juga melalui beberapa tahapan yaitu penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Carawali dikatakan kurang efektif karena tidak memenuhi semua asas 6 tepat yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, tepat mutu. Yang tidak memenuhi 6 tepat yaitu tepat jenis, dimana jenis pupuk yang diberikan tidak sesuai dengan RDKK yang telah di musyawarahkan sebelumnya yang dibutuhkan petani. Hasil tersebut juga mendukung hasil peneltiian ini bahwa para

petani dinilai tidak tepat dalam penggunaannya sehingga mereka membutuhkan tambahan pupuk. Kurangnya perhitungan penggunaan pupuk menjadi penyebab masalah ketercukupan pupuk bersubsidi bagi para petani.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

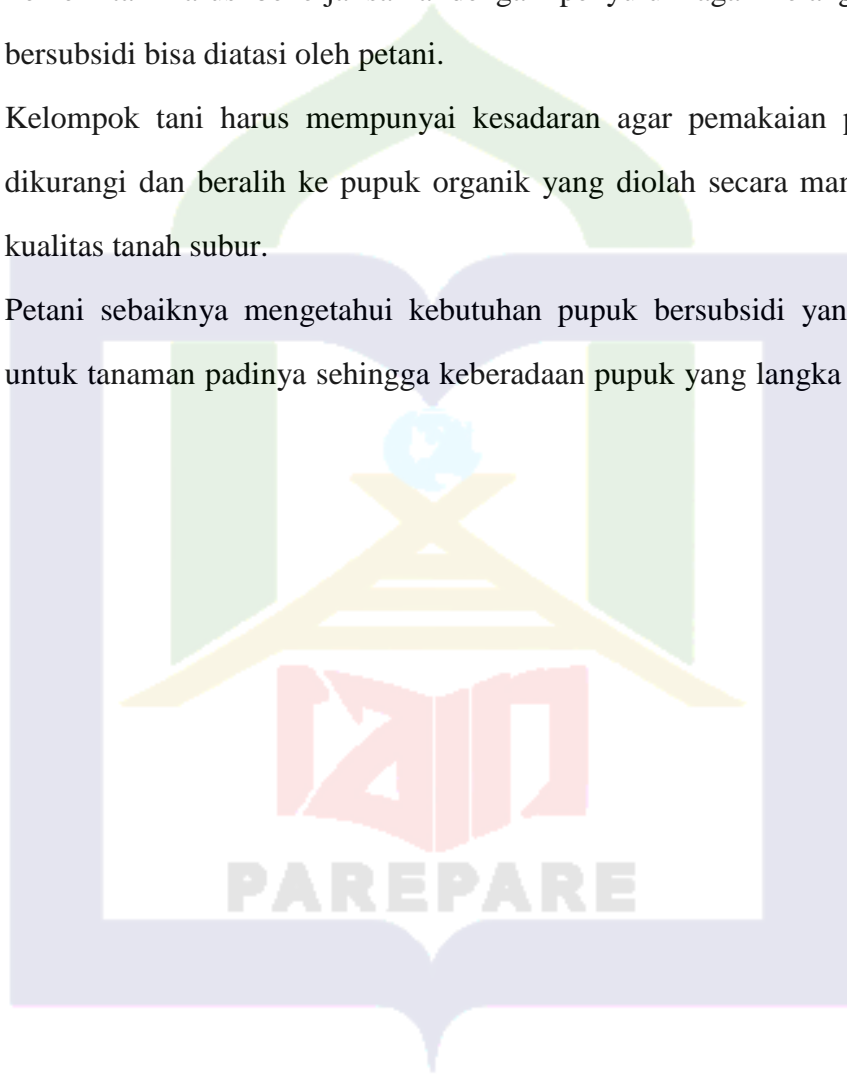
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat membuat kesimpulan dari hasil penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Upaya kelompok tani mengelola pupuk bersubsidi di Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap yaitu Pertemuan pengurus kelompok tani yang terdiri dari ketua kelompok tani, sekretaris, bendahara dan kepala-kepala seksi. Musyawarah anggota kelompok tani dipimpin oleh ketua kelompok tani. Pertemuan pengurus kelompok tani untuk membahas dan merumuskan RDKK. Meneliti kelengkapan RDKK dan penandatanganan RDKK..
2. Bentuk pengelolaan pupuk bersubsidi di Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap yaitu dengan melalui beberapa tahapan 1) perencanaan yang dilakukan sebagai sarana awal dalam pencatatan jumlah dan takaran penyaluran pupuk hingga ketangan para petani, 2) penyaluran yang diawasi sesuai dengan permendag, 3) pengawasan yang bertujuan untuk efektifiitasan jumlah dan kebutuhan pupuk bersubsidi, 4) Monitoring evaluasi penyediaan dan penyaluran melalui badan pengawasan 5) Verifikasi penyaluran yaitu bentuk pendampingan penyaluran hingga dapat digunakan oleh para petani sesuai dengan kebutuhannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan adapun beberapa saran untuk kelompok tan di Desa Carawali :

1. Pemerintah harus bekerja sama dengan penyuluh agar kelangkaan pupuk bersubsidi bisa diatasi oleh petani.
2. Kelompok tani harus mempunyai kesadaran agar pemakaian pupuk kimia dikurangi dan beralih ke pupuk organik yang diolah secara mandiri supaya kualitas tanah subur.
3. Petani sebaiknya mengetahui kebutuhan pupuk bersubsidi yang digunakan untuk tanaman padinya sehingga keberadaan pupuk yang langka bisa teratasi.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Analisis Kebijakan Pertanian. 2014. Volume 11 NO. 1,

Budio, Sesra. 2019. Strategi Manajemen Sekolah, *Jurnal Menata*: Vol. 2.

Butar, Hermes Saroha. 2015. *Strategi Dinas Tenaga Kerja dalam Mengatasi Masalah Pengangguran di Kota Pekanbaru*, *JOM FISIP*, Vol. 2, No. 2.

Hadi, Sumasno. 2016. Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi, *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Jilid 22, No.1.

Hasibun, Dewi Citra. 2012. “Peranan Kelompok Tani Terhadap Keberhasilan Penyaluran Pupuk Bersubsidi”. Skripsi Sarjana; Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara Medan.

[Http://www.manadokota.go.id/berita-1194-apakah--diseminasi--informasi--itu.html](http://www.manadokota.go.id/berita-1194-apakah--diseminasi--informasi--itu.html), (diakses pada tanggal 13 Juli 2022)

Ikkal, Mohamad. 2014. “Peranan Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi Sawah Di Desa Margamulya Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali”. *Jurnal Agrotekbis*, Vol. 2 No. 5, Oktober.

Khairunisa. 2009. “Efektifitas Penyaluran Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Padi Di Kabupaten Lampung Tengah”. Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi Universitas Lampung Bandar Lampung.

Monang. 2014. *Tafsir Al-Quran Kemenag Online*, <https://tafsir.kemenag.blogspot.com/2014/10/tafsir-surah-al-araf-58.html> (diakses pada tanggal 18 April 2022)

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2010. *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara.

Nugrahani, Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, Solo: Cakra Books.

Nugroho, Agus Dwi. 2018. “Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Skripsi Sarjana; Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Pamertan. 2015. *Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan*, Jakarta: Departemen Pertanian RI.

- Prasetia, Rinaldi dan Tubagus Hasanuddin. 2015. "Peranan Kelompok Tani Dalam Peningkatan Pendapatan Petani Kopi Di Kelurahan Tugusari Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat" *Jurnal Agrobisnis*, Vol. 3 No. 3.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia. 2013. No 15/m-dag/per/4/2013, *Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian*, Jakarta.
- Pupuk Indonesia Holding Company. "Pupuk Indonesia Holding Company", dalam pupukindonesia.com/id/profil (diakses pada tanggal 11 februari 2022)
- Rachmawati, Imami Nur. 2017. Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara, *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Volume 11 , Nomor 1.
- Rasyid, Harun. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama*, Pontianak: STAIN Pontianak.
- Rijali, Ahmad. 2018. Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Alhadharah*, Vol.17, No. 33.
- Sani, Ekky Maria Farida. 2013. Pemanfaatan *Buletin Putakawan* Oleh Pustakawan Di Kota Semarang, *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, Volume 2, Nomor 3,
- Setiawan, Iwan. 2012. *Agribisnis Kreatif*, Penebar Swadaya, Jakarta.
- Setiadi, Edi dan Rena Yulia. 2010. *Hukum Pidana Ekonomi*. Graha ilmu, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. CV. Alfabeta, Jakarta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* ,Makalah dan Skripsi, Parepare: IAIN Parepare, 2020.
- Unikom, "Tinjauan Pustaka: Pengertian Pupuk", dalam lib.unikom.ac.id/download.php?id=225314 (diakses pada tanggal 10 februari 2022).
- Usman Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2017. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 01: Nama Nama Kelompok Tani**Daftar Nama-Nama Kelompok Tani**

No.	Nama kelompok tani	Nama ketua	Waktu pembentukan	Komoditas
1.	Watang panua	Maruf	2013	Padi
2.	Mamminasae	Laini	2013	Padi
3.	Duppa mata	Usman	2014	Padi
4.	Hasil padi	Syamsuddin	2012	Padi
5.	Makkuragae	H.mani	2015	Padi
6.	Manennungeng I	Laupu	2014	Padi
7.	Manennungeng II	Mustakim	2015	Padi
8.	Sipulungge	Rinaldi	2013	Padi
9.	Sipulungge II	Corre	2014	Padi
10.	Mallawa I	Amri	2012	Padi
11.	Mallawa II	Aminuddin	2013	Padi
12.	Celli'e	Abd hamid	2012	Padi
13.	Lawaetuo	Laji	2011	Padi
14.	Cenpaka	Jisman	2012	Padi
15.	Reso pammase	Ahmad	2013	Padi
16.	Sipatuo deceng	Iskandar	2015	Padi
17.	Allagang	Gasali	2010	Padi
18.	Malampe	P. dari	2012	Padi

19.	Lawaetuo II	H. palemmai	2012	Padi
20.	Cellie III	Baharuddin	2014	Padi
21.	Cellie II	Sudi	2013	Padi
22.	Watang panua II	Mamma	2014	Padi
23.	Makmur	Dalle	2011	Padi



Lampiran 02 :Pedoman Wawancara

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : NURHIKMA
NIM : 18.3400.005
PRODI : PEGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
JUDUL :UPAYA KELOMPOK TANI DALAM MENGELOLA PUPUK BERSUBSIDI DI DESA CARAWALI KECAMATAN WATANG PULU KABUPATEN SIDRAP

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Responden

1. Nama :
2. Umur :
4. Pendidikan Terakhir :
5. Nama kelompok tani :
6. Lama bergabung di kelompok :
7. Luas lahan :

B. Daftar Pertanyaan

Wawancara untuk petani/ kelompok tani desa Carawali

1. Apakah kelompok tani melakukan penyaluran pupuk bersubsidi hanya untuk anggota yang bergabung di kelompok tani saja?

Jawaban:

2. Apakah orang yang tidak bergabung di kelompok tani bisa dengan mudah mendapatkan pupuk bersubsidi?

Jawaban :

3. Apakah tempat masuknya pupuk bersubsidi dari pemerintah untuk petani sesuai dengan persetujuan kelompok tani sebelumnya?

Jawaban :

4. Apakah jenis pupuk yang diberikan ke petani sesuai dengan kebutuhan petani?

Jawaban :

5. Apakah waktu pemberian pupuk bersubsidi ke petani tepat waktu sesuai dengan kebutuhan?

Jawaban :

6. Berapakah rata rata jumlah pupuk bersubsidi yang diterima kelompok tani setiap musim tanamnya?

Jawaban:

7. Apakah dengan adanya pupuk bersubsidi dapat mencukupi kebutuhan pupuk untuk produksi padi?

Jawaban:

8. Berapakah dosis penggunaan pupuk bersubsidi setiap luas lahan?

Jawaban: Jumlah kg luas lahan ha

9. Bagaimanakah cara pembayaran dalam pembelian pupuk bersubsidi?

Jawaban:

10. Apakah harga pupuk bersubsidi yang diberikan petani sesuai dengan Harga Ecer Tertinggi (HET) yang telah di sepakati sebelumnya oleh kelompok tani?

Jawaban :





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24494
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-100 /In.39.7/PP.00.9/07/2022 Parepare, 26 Juli 2022
Lamp : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Di-
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan dibawah ini Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) parepare menerangkan bahwa:

Nama : NURHIKMA
Tempat/Tgl. Lahir : Carawali, 18 April 2000
NIM : 18.3400.005
Semester : VIII
Alamat : Carawali, Pinrang Sidrap

Adalah mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) parepare bermaksud akan mengadakan penelitian di Daerah **KAB. SIDRAP** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

UPAYA KELOMPOK TANI MENGELOLA PUPUK BERSUBSIDI DI DESA CARAWALI KECAMATAN WATANG PULU KABUPATEN SIDRAP

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli 2022 S/d Agustus 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut dimohon kerjasamanya agar kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin sekaligus dukungan dalam memperlancar penelitiannya.

Demikian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb

Dekan,





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 272/IP/DPMTSP/7/2022

- DASAR
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permohonan **NURHIKMA** Tanggal **27-07-2022**
 3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE** Nomor **B-1489/In.39.7/PP.00.9/07/2022** Tanggal **26-07-2022**

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : NURHIKMA
ALAMAT : JL. POROS RAPPANG, DESA CARAWALI, KEC. WATANG PULU
UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :
NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
JUDUL PENELITIAN : " UPAYA KELOMPOK TANI MENGELOLA PUPUK BERSUBSIDI DI DESA CARAWALI KECAMATAN WATANG PULU KABUPATEN SIDRAP "

LOKASI PENELITIAN : DESA CARAWALI

JENIS PENELITIAN : KUALITATIF
LAMA PENELITIAN : 27 Juli 2022 s.d 27 Agustus 2022

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal : 27-07-2022



Biaya : Rp. 0,00

- Tembusan :
- DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
 - KEPALA DESA CARAWALI
 - PERTINGGAL



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN WATANG PULU
DESA CARAWALI
Jl.Poros Pare Rappang No 1 Tlp Pos. 91661

SURAT KETERANGAN
Nomor : 141/100/186/P-DC/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : **ABD HAFID.MEKKA,A.M.P.,S.IP**
Jabatan : Kepala Desa Carawali

Menerangkan bahwa :

2. N a m a : **NURHIKMA**
Nomor Pokok : 18.3400.005
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Pekerjaan : Mahasiswi (S1)
Alamat : JL.Poros Rappang ,Desa Carawali,Kec.Wt.Pulu

Tersebut diatas pada point 2 benar melaporkan telah melakukan penelitian tentang **"UPAYA KELOMPOK TANI MENGELOLA PUPUK BERSUBSIDI DI DESA CARAWALI KECAMATAN WATANG PULU KABUPATEN SIDRAP"** yang berlangsung mulai tanggal 27 Juli 2022 s/d 27 Agustus 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Carawali, 27 Agustus 2022

Kepala Desa Carawali

(**ABD HAFID.MEKKA,A.M.P.,S.IP**)



Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah :

Nama Lengkap : Alex

Umur : 47 tahun

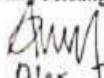
Nama Kelompok Tani: Sipatuo Deceng

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Nurhikma untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul "Upaya Kelompok Tani Mengelola Pupuk Bersubsidi Di Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Carawali, 28 Juli 2022

Yang bersangkutan


Alex

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah :

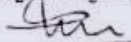
Nama Lengkap: Burhanuddin B
Umur: 44 tahun
Nama Kelompok Tani: Sipatuo Deceng

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Nurhikma untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul "Upaya Kelompok Tani Mengelola Pupuk Bersubsidi Di Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Carawali, 22, Juli, 2022

Yang bersangkutan


Burhanuddin B

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah :

Nama Lengkap : Dion

Umur : 32

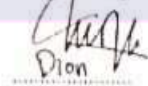
Nama Kelompok Tani : Duffa Mata

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Nurhikma untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul "Upaya Kelompok Tani Mengelola Pupuk Bersubsidi Di Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Carawali, 13, Juli, 2022

Yang bersangkutan


Dion

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah :

Nama Lengkap : *Muhammad Hasbi*

Umur : *39 tahun*

Nama Kelompok Tani: *Sipulungge*

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Nurhikma untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul "Upaya Kelompok Tani Mengelola Pupuk Bersubsidi Di Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Carawali, 28 . Juli .2022

Yang bersangkutan

Hasbi
Muhammad Hasbi

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah :

Nama Lengkap *Muhammad Jafar*

Umur *43*

Nama Kelompok Tani *Duppa Mata*

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Nurhikma untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul "Upaya Kelompok Tani Mengelola Pupuk Bersubsidi Di Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Carawali, 28 Juli 2022

Yang bersangkutan

Jafar
Muhammad Jafar

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah :

Nama Lengkap : *Jamal*

Umur : *41*

Nama Kelompok Tani: *Sipulungge*

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Nurhikma untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul "Upaya Kelompok Tani Mengelola Pupuk Bersubsidi Di Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Carawali, 28, Juli, 2022

Yang bersangkutan

Jamal
Jamal

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah :

Nama Lengkap : Rivaldi

Umur : 40 tahun

Nama Kelompok Tani : Sipulungge

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Nurhikma untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul "Upaya Kelompok Tani Mengelola Pupuk Bersubsidi Di Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Carawali, 21 Juli 2022

Yang bersangkutan

Rivaldi
Rivaldi

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah :

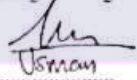
Nama Lengkap : Usman
Umur : 60 tahun
Nama Kelompok Tani: Dappa Mata

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Nurhikma untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul "Upaya Kelompok Tani Mengelola Pupuk Bersubsidi Di Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Carawali, 28, Juli, 2022

Yang bersangkutan


Usman

VII

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah

Nama Lengkap Muhammad Yunus

Umur 66

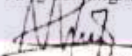
Nama Kelompok Tani Sipatuo Deceng

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Nurhikma untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul "Upaya Kelompok Tani Mengelola Pupuk Bersubsidi Di Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Carawali, 28 Juli 2022

Yang bersangkutan


Muhammad Yunus

DOKUMENTASI PENELITIAN









BIODATA PENULIS

Penulis bernama Nurhikma, dilahirkan di Desa Carawali Kecamatan Watang pulu Kabupaten Sidrap pada tanggal 18 April 2000. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari Ayah Makkasau dan Ibu Mulyani.

Penulis memulai pendidikan di Taman Kanak-kanak Desa Carawali, lalu melanjutkan pendidikannya di Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Carawali pada tahun 2006-2012. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Watang pulu pada tahun 2012-2015, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sidrap pada tahun 2015-2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di IAIN Pare-pare dengan mengambil program studi Pengembangan Masyarakat Islam, fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah pada tahun 2018.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis pernah magang di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidrap. Selain itu penulis pernah melakukan kegiatan KPM (Kuliah Pengabdian Masyarakat) di Kelurahan Batu Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap. Tugas akhir dalam pendidikan tinggi diselesaikan dengan menulis skripsi yang berjudul “Upaya Kelompok Tani Mengelola Pupuk Bersubsidi Di Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap”.